

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK
Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan Dalam
Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang
(Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)



Oleh:
Zarfinayenti
NIM. 08.3.700/BR

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) STUDI ISLAM
PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

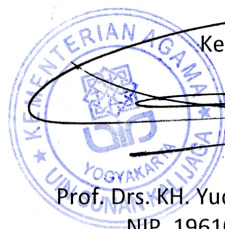
PENGESAHAN

- Disertasi berjudul : PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK Studi Peran, Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)
- Ditulis oleh : Zarfina Yenti, S.Ag., M.Ag.
- NIM : 08.3.700/BR
- Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 25 Februari 2019

Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198801 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL **19 DESEMBER 2016**, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR PADA HARI INI, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDA, **ZARFINA YENTI, S.Ag., M.Ag.** NOMOR INDUK MAHASISWA **08.3.700/BR** LAHIR DI **MALIKI AIR RAWANG TANGGAL 2 MEI 1973**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

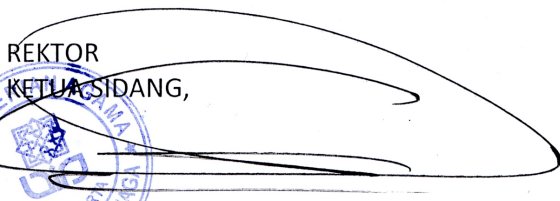
~~PUJIAN (CUM LAUDE) / SANGAT MEMUASKAN / MEMUASKAN*~~

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM BIDANG STUDI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE - 634

YOGYAKARTA, 25 FEBRUARI 2019

REKTOR
KETUA SIDANG,


PROF. DRs. KH. YUDIAn WAHYUDI, MA., Ph.D.
NIP. 19610401 198803 1 002

* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul : PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK Studi Peran, Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Masa Reformasi sampai Sekarang (Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)

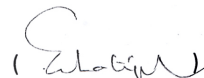
Nama Promovenda : Zarfina Yenti, S.Ag., M.Ag.
N I M : 08.3.700/BR

()

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

()

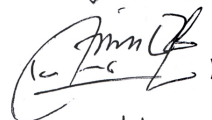
Sekretaris Sidang : Dr. Eva Latipah, S.Ag., M.Si.

()

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Bambang Cipto, MA.
(Promoto/Penguji)

()

2. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., MA., Ph.D.
(Promoto/Penguji)

()

3. Dra. Siti Syamsiyatun, MA., Ph.D.
(Penguji)

()

4. Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA.
(Penguji)

()

5. Dr. Agus Suwigyo, MA.
(Penguji)

()

6. Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.
(Penguji)

()

Dijukan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019

Waktu : Pukul 10.30 s/d selesai

Hasil / Nilai (IPK) : 3,51

Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cum Laude)~~ / Sangat Memuaskan / Memuaskan



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

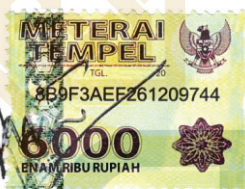
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Zarfinayenti, S.Ag., M.Ag.
N I M : 08.3.700/BR
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *Program by Research*

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Zarfinayenti, S.Ag., M.Ag.
NIM. 08.3.700/BR



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. H. Bambang Cipto, MA. ()

Promotor : Dra. Siti Syamsiatun, MA., Ph.D. ()



NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul :

PARSTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK
Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan Dalam Politik
di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang
(Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)

Yang ditulis oleh :

N a m a : Zarfinayenti, S.Ag., M.Ag.
N I M : 08.3.700/BR
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 19 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Juni 2017

Promotor,



Prof. Dr. H. Bambang Cipto, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul :

PARSTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK
Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan Dalam Politik
di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang
(Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)

Yang ditulis oleh :

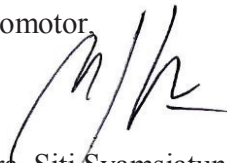
N a m a : Zarfinayenti, S.Ag., M.Ag.
N I M : 08.3.700/BR
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 19 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Juni 2017

Promotor



Dra. Siti Syamsiatun, MA., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul :

PARSTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK

Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan Dalam Politik
di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang
(Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)

Yang ditulis oleh :

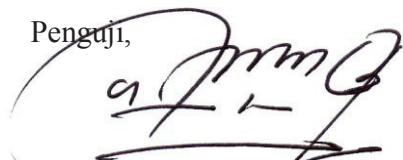
N a m a : Zarfinayenti, S.Ag., M.Ag.
N I M : 08.3.700/BR
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 19 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2017

Penguji,



Alimatul Qibtiyah, M.Si., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul :

PARSTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK
Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan Dalam Politik
di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang
(Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)

Yang ditulis oleh :

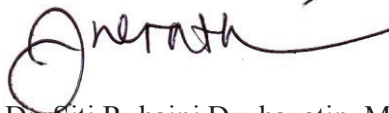
N a m a : Zarfinayenti, S.Ag., M.Ag.
N I M : 08.3.700/BR
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam by Research

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 19 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2017

Penguji,



Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul :

PARSTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK
Studi Peran, Peluang, dan Tantangan Perempuan Dalam Politik
di Provinsi Jambi Masa Reformasi Sampai Sekarang
(Pengalaman Beberapa Politisi Perempuan)

Yang ditulis oleh :

N a m a : Zarfinayenti, S.Ag., M.Ag.
N I M : 08.3.700/BR
Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam *by Research*

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 19 Desember 2016, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Juni 2017

Penilai,



Dr. Agus Suwignyo

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari perkembangan demokrasi di Indonesia yang memulai babak baru dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 serta terbukanya era Reformasi dengan dibuktikannya pelaksanaan Pemilu. Pada Pemilu, tahun 2004, publik mulai ramai membicarakan perempuan dalam arena politik formal berdasarkan Undang-undang Pemilu No. 12 2003 yang memuat keterwakilan 30 persen perempuan dan Undang-undang nomor 2 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi undang-undang no 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Proses ini berlanjut pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 dengan tema yang berbeda. Pada Pemilu 2014 terjadi penurunan jumlah perempuan di parlemen yang sebelumnya 18 persen menjadi 17 persen. Kewajiban parpol untuk mencalonkan minimal 30 persen caleg perempuan dari seluruh jumlah caleg perempuan dari seluruh jumlah caleg di setiap daerah pemilihan seperti diamanatkan UU Pemilu dan keberadaan PKPU yang memungkinkan KPU untuk mencoret parpol dari kepesertaan pemilu di dapil yang jumlah caleg perempuannya kurang dari 30 persen, memang berhasil meningkatkan persentase pencalonan caleg perempuan, akan tetapi hal ini tidak secara otomatis juga meningkatkan keterpilihan perempuan. Hal yang sama bukan hanya terjadi pada level pusat tetapi juga daerah seperti Jambi. Untuk itulah yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini adalah : “Bagaimanakah Partisipasi Perempuan Dalam Politik di Provinsi Jambi?”

Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Jambi yang terdiri dari sebelas kabupaten kota. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasusnya itu suatu metode yang dapat mengungkap secara rinci fenomena atau situasi dari unit analisis yang berupa individu, kelompok individu atau entitas lain atas dasar informasi yang dikumpulkan secara sistematis. Masalah utama yang akan menjadi sasaran penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Jambi studi kasus lima orang politisi dengan mengamati peran, peluang dan tantangan yang dihadapinya serta strategi yang dilakukan. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dengan pendekatan gender dan sosiologi politik.

Hasil penelitian menunjukkan secara makro partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia semenjak reformasi sampai

Pemilu 2014 tergolong rendah baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas masih sangat jauh dari angka 30%. Secara kualitas persoalan yang berkaitan dengan gender masih banyak yang belum terselesaikan. Masih tingginya tingkat kemiskinan, HDI yang masih rendah, tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi.

Secara nasional masalah utama terkait keterwakilan perempuan adalah kelembagaan. Jika masalah sosial dilihat dari pendapat masyarakat tentang keterwakilan perempuan seperti hasil survey UNDP, maka masalah sosial bukan faktor penghambat utama. Akan tetapi masalah sosial dan kelembagaan menjadi masalah utama di Provinsi Jambi. Masalah sosial budaya yang paling menghambat adalah adat istiadat masyarakat dan hambatan domestik. Secara nasional terdapat praktik politik keluarga (politik dinasti) yang memperlihatkan 36 % mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan atau elit partai. Hal ini juga terjadi di provinsi Jambi yang memperlihatkan anggota legislatif perempuan yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala daerah atau mantan kepala daerah. Hal ini mempunyai dampak negatif terutama menghalangi terlaksananya Pemilu yang adil. Perpolitikan dinasti merusak kepercayaan akan keagenan perempuan terpilih menjadi legislator dan merupakan bentuk penyalahgunaan kebijakan afirmasi bagi perempuan.

Dinamika pergerakan organisasi social politik perempuan Jambi sangat dinamis terutama pada organisasi-organisasi perempuan seperti Nasyyatul 'Aisyiah, Fatayat NU dan BKMT, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Akan tetapi secara substansi belum ada aktivis dari organisasi perempuan yang menjadi anggota legislatif di provinsi Jambi. Seringkali organisasi perempuan seperti BKMT dimanfaatkan oleh caleg perempuan. Demikian juga dengan KPI wilayah Jambi Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh pada masa reformasi belum maksimal dalam memperjuangkan hak politik perempuan. Bahkan sering kali suara mereka tidak didengar oleh caleg perempuan itu sendiri.. Maka dengan demikian modal sosial tidak dianggap penting oleh perempuan dan partai politik. Partai politik lebih mengutamakan modal ekonomi dibandingkan modal sosial. Berdasarkan pengalaman beberapa politisi dari tahun 1999 sampai 2014 patron struktural lebih kuat dari solidaritas identitas yang menyebabkan peran perempuan dalam politik belum maksimal.

Strategi jangka pendek tidak efektif dalam membangun kesadaran masyarakat Jambi yang berimplikasi pada strategi jangka

panjang, Meskipun pembangunan gender di provinsi Jambi meningkat. Tidak adanya sinkronisasi strategi jangka pendek dan jangka panjang diakibatkan oleh adanya proses yang terpotong dalam membangun kesadaran menyebabkan strategi jangka panjang tidak efektif dengan sendirinya. Sehingga tidak mampu mencapai representasi perempuan bila kesadaran mikro Jambi dan individu tidak terbangun. Yang mengakibatkan struktural patriarkhi menjadi bertahan. Dan tidak terbangun solidaritas identitas tentang kejambian. Pada akhirnya sejarah Jambi yang panjang pernah dipimpin oleh seorang Putri yang gagah berani masih jauh dari harapan.

Kata Kunci : Demokrasi, Partisipasi, Parlemen, Orde Baru, Reformasi, Keterwakilan 30 %



ABSTRACT

This research departs from the development of democracy in Indonesia which began a new chapter with the fall of the New Order regime in 1998 and the opening of the Reformation era evidenced by the implementation of the General Election. In the 2004 General Election, the public began to discuss women in the formal political arena based on the Election Law No. 12 2003 which contains representation of 30% of women and Law number 2 of 2008 which has been revised into Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties. This process continued in the 2009 and 2014 elections with different themes. In the 2014 election there was a decrease in the number of women in parliament from 18% to 17%. The obligation of political parties to nominate at least 30% of female candidates from the total number of candidates in each electoral district is mandated by the Election Law and the existence of PKPU which allows the KPU to cross political parties from electoral participation in electoral districts whose female candidates are less than 30%. This has indeed succeeded in increasing the percentage of the nomination of female candidates, but this does not automatically increase women's electability. The same thing happens not only at the central level but also in regions such as Jambi. For this reason, the main problem in this research is: "How is the Participation of Women in Politics in Jambi Province?"

This research is carried out in Jambi Province which consists of eleven cities-districts. This type of research is qualitative with the case study method that is a method that can reveal in detail the phenomenon or situation of the analysis unit in the form of individuals, groups of individuals or other entities based on information collected systematically. The main problem that will be the target of this study is the participation of women in politics in Jambi Province, a case study of five politicians by observing the roles, opportunities and challenges they face and the strategies that are carried out. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The approach used is the gender approach and political sociology.

The results of the study show that macro participation of women in politics in Indonesia since the reforms until the 2014 Election is classified as low both in quantity and quality. The quantity is still very far from 30%. In terms of quality, there are still

many issues related to gender that have not been resolved, e.g., the still high level of poverty, low HDI, or the high rates of maternal and infant mortality.

Nationally the main problem related to women's representation is institutional. If social problems are seen from people's opinions about women's representation such as UNDP survey results, social problems are not the main inhibiting factor. However, social and institutional problems become a major problem in Jambi Province. The most inhibiting socio-cultural problems are community customs and domestic barriers. Nationally there are practices of family politics (dynastic politics) which show that 36% have family relations with party leaders or elites. This is also the case in Jambi Province which shows female legislators who have family relations with the regional head or former regional head. This has a negative impact especially on preventing the implementation of a fair election. Dynasty politics undermine women's trust in being elected legislators and a form of abuse of affirmative policies for women.

The movement of women's social and political organizations in Jambi is very dynamic, especially in women's organizations such as Nasyiatul 'Aisyiah, Fatayat NU and BKMT, and Non-Governmental Organizations. However, substantially there are no activists from women's organizations who are members of the legislature in Jambi Province. Often women's organizations such as BKMT are used by female candidates. Likewise with KPI Jambi region, Non-Governmental Organizations that grew up during the reform period have not been maximized in fighting for women's political rights. In fact, often their voices are not heard by the female candidates themselves. Thus, social capital is not considered important by women and political parties. Political parties prioritize economic capital rather than social capital. Based on the experience of several politicians from 1999 to 2014, the structural patron was stronger than identity solidarity which caused the role of women in politics to not be maximized.

The short-term strategy is not effective in building awareness of the people of Jambi which has implications for the long-term strategy, although gender development in Jambi Province has increased. The absence of short-term and long-term synchronization strategies is caused by a process that is cut in building awareness causing long-term strategies to be ineffective automatically. Thus, women's representation is not able to be achieved if individuals'

micro-awareness is not awakened resulted in a patriarchal structure to survive and there is no awakening of identity solidarity about Jambi. In the end, the long history of Jambi that was once led by a brave woman is still far from expectations.

Keywords: Democracy, Participation, Parliament, New Order, Reform, 30% Representation.



ملخص

يستند هذا البحث إلى تطور الديمقراطية في إندونيسيا التي بدأت فصلا جديدا مع سقوط النظام الجديد عام 1998، وانفتاح عهد الإصلاح كما يتضح ذلك من تنفيذ الانتخابات. في الانتخابات عام 2004، بدأ الجمهور ينشغلون بمناقشة مشاركة النساء في السياسية الرسمية على أساس قانون الانتخابات رقم 2003/12 الذي يتضمن تمثيل 30% من النساء، والقانون رقم 2 عام 2008 الذي تم تنقيحه في القانون رقم 2 عام 2011 بشأن الأحزاب السياسية. واستمرت هذه العملية في الانتخابات عام 2009 و 2014 بموضوعات مختلفة. في الانتخابات عام 2014 كان هناك انخفاض في عدد النساء في البرلمان، الذي كان في السابق 18 % إلى 17 % . التزامات الأحزاب السياسية لترشيح لا يقل عن 30% من المرشحات من كافة عدد المرشحات من جميع عدد المرشحين في كل منطقة انتخابية كما هو مطلوب بموجب قانون الانتخابات ووجود لوائح لجنة الانتخابات العامة التي تسمح للجنة لإسقاط الأحزاب السياسية من عضويتها في الانتخابات في المنطقة الانتخابية إن كان عدد المرشحات أقل من 30%، وقد نجحت فعلا في تطوير النسبة المئوية لترشيح المرشحات، لكن هذا لا يزيد تلقائياً من انتخاب النساء. وقد حدث نفس الشيء على المستويين المركزي الإقليمي، بما في ذلك منطقة جامبي. ولهذا، فإن المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي: "كيف تشارك النساء في الساحة السياسية في مقاطعة جامبي؟" .

يجرى هذا البحث في مقاطعة جامبي التي تتكون من إحدى عشرة منطقة ومدينة. نوع هذا البحث هو بحث نوعي، من خلال دراسة الحالة التي يمكن أن تكشف تفصيلا ظاهرة أو حالة وحدة التحليل الفردي، أو مجموعة من الأفراد، أو الكيانات الأخرى على أساس المعلومات التي تم جمعها بشكل منهجي. المشكلة الرئيسية التي من شأنها تكون هدفا من هذا البحث هي مشاركة النساء في الساحة السياسية في مقاطعة جامبي، دراسة حالة خمسة سياسيين بالملاحظات إلى الدور، والفرصة والتحديات التي يواجهونها واستراتيجياتهم. وتقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظات،

والمقابلات، والوثائق. كما أن النهج المستخدم هو نهج الجنس وسوسيولوجيا السياسة.

من النتائج التي توصل إليها هذا البحث هو أن المشاركة الكلية للنساء في السياسة في إندونيسيا منذ عهد الإصلاح حتى الانتخابات عام 2014 كمية وجودة تعدّ منخفضة. من حيث الكمية لا تزال مشاركتهن بعيدة جدا عن 30 ٪. ومن حيث الجودة، لا تزال هناك العديد من المشكلات المتعلقة بنوع الجنس التي لم يتم حلها. ولا يزال مستوى الفقر مرتفعاً، وانخفاض مؤشر التنمية البشرية، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع.

على الصعيد الوطني، المشكلة الرئيسية المتعلقة بتمثيل النساء هي مشكلة مؤسسية. بالنظر إلى المشكلة الاجتماعية من آراء الناس حول تمثيل النساء مثل نتيجة المسح التي أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن المشكلة الاجتماعية ليست عاملاً مثبطاً رئيسياً. ولكن، أصبحت المشكلة الاجتماعية والمؤسسية مشكلة رئيسية في مقاطعة جامبي. وأكثر المشكلة الاجتماعية والثقافية تثبيطاً هي العادات المجتمعية والحوافز المحلية. على الصعيد الوطني، هناك ممارسات السياسة الأسرية تبين أن 36٪ منهم ذوا علاقات عائلية مع قادة الأحزاب أو النخب. وهلما جرا في مقاطعة جامبي التي تُظهر أن أعضاء تشريعات لهن علاقات عائلية مع رئيس المنطقة أو رئيس المنطقة السابق. ولهذا تأثير سلبي، خاصة منع تنفيذ الانتخابات النزيهة. ويمكن تسييس الأسرة أن يقوض ثقة النساء المنتخبة، ونوع من إساءة استخدام السياسات التأكيدية للنساء.

ديناميكية حركات المنظمات الاجتماعية والسياسية لنساء جامبي تتطور وتتغير سريعاً، وخاصة للمنظمات النسائية مثل ناشئة العائشية، وفتيات نهضة العلماء، وهيئة الاتصال لمجلس التعليم، والمنظمات غير الحكومية. ومع ذلك، لا يوجد نشاط من المنظمات النسائية التي هي أعضاء الهيئة التشريعية في مقاطعة جامبي. وفي كثير من الأحيان، المنظمات النسائية، مثل هيئة الاتصال لمجلس التعليم تستفيد من مرشحات النساء. وكذلك بشأن هيئة الإذاعة الإندونيسية، باعتبارها المنظمة غير الحكومية التي نشأت خلال فترة الإصلاح، لم تصل إلى حد أقصى في

ترويج الحقوق السياسية للنساء. وغالباً ما لا تُسمع أصواتهن من قبل المرشحات أنفسهن. وبالتالي، فإن رأس المال الاجتماعي لا يعتبر هاماً من قبل النساء والأحزاب السياسية. بحيث أن الأحزاب السياسية تفضل رأس المال الاقتصادي بدلاً من رأس المال الاجتماعي. واستناداً إلى خبرة العديد من السياسيين في الفترة من 1999 إلى 2014، كان الراعي الهيكلي أقوى من تضامن الهوية الذي يسبب إلى عدم رقي دور النساء في السياسة.

الاستراتيجية القصيرة المدى ليست فعالة لبناء وعي مجتمع جامبي، وأثرت على الاستراتيجية الطويلة المدى، بالرغم من تطور بناء نوع الجنس في مقاطعة جامبي. وعدم تزامن الاستراتيجية القصيرة والطويلة بسبب العملية المنقطعة في بناء الوعي، يسبب إلى عدم فعالية الاستراتيجية الطويلة المدى. حتى يعجز على تحقيق تمثيل النساء لأن الوعي الجزئي الجامبي والفردى لم يكن يقظاً. مما أدى إلى استدامة بنية الأبوية، وعدم بناء تضامن الهوية حول الجامبية. وفي النهاية، كان تاريخ جامبي الطويل تحت قيادة امرأة شجاعة لا تزال بعيدة عن التوقعات.

الكلمات المفتاحية : الديمقراطية، المشاركة، البرلمان، النظام الجديد، الإصلاح، تمثيل 30%.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّةٌ مُتَعَدِّدَةٌ	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَانِنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	a	مَنْ نَصَرَ وَقَتَلَ	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كَمْ مِنْ فِئَةٍ	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سُدُسٌ وَخَمْسٌ وَثَلَاثٌ	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	Ā	فَتَّاحٌ رَزَّاقٌ مَنَّانٌ	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مَسْكِينٌ وَفَقِيرٌ	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	Ū	دُخُولٌ وَخُرُوجٌ	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Faṭḥah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muḥaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”.

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزيلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محّدة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “*al-*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū'</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥadrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-'ulamā'</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā'il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi'ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḏahab</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka identifikasi masalah yang dihadapi perempuan dalam politik setelah reformasi sampai PEMILU tahun 2014. Dengan melihat Peran, peluang dan tantangan perempuan dalam politik di Provinsi Jambi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik dan gender dapat disimpulkan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik bukan hanya di Jambi tetapi di Indonesia pada umumnya. Secara nasional masalah utama terkait keterwakilan perempuan adalah kelembagaan. Sedangkan masalah sosial dan kelembagaan menjadi masalah utama di Provinsi Jambi. Masalah sosial budaya yang paling menghambat adalah adat istiadat masyarakat dan hambatan domestik. Secara nasional terdapat praktik politik keluarga (politik dinasti) yang memperlihatkan 36 % mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan atau elit partai. Hal ini juga terjadi di provinsi Jambi yang memperlihatkan anggota legislatif perempuan yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala daerah atau mantan kepala daerah. Hal ini mempunyai dampak negatif terutama menghalangi terlaksananya Pemilu yang adil. Perpolitikan dinasti merusak kepercayaan akan keagenan perempuan terpilih menjadi legislator dan merupakan bentuk penyalahgunaan kebijakan afirmasi bagi perempuan.

Penelitian ini dapat dilakukan hingga terwujud dalam bentuk laporan sederhana ini berkat dukungan dan bantuan banyak pihak, mulai dari penyusunan proposal penelitian, selama proses penelitian dan penulisan laporan penelitian. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa pihak, di antaranya:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Kalijaga), Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D. (Direktur Pascasarjana), Dr. Moch Nur Ichwan, MA. (Wakil Direktur Pascasarjana), Ahmad Rafiq, MA., Ph.D. (Ketua Program Studi Doktor), dan seluruh jajaran pengelola Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studin

2. Prof, Dr. H. Bambang Cipto, MA dan Dra Siti Syamsiatun, MA., Ph.D. sebagai promotor, disampaikan terimakasih yang tak terhingga atas bimbingan, diskusi serta nasehatnya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
3. Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA, Alimatul Qibtiyah, M.Si., Ph.D dan Dr. Agus Suwinyo., selaku penguji, disampaikan terimakasih atas masukan dan arahan yang sangat penting untuk perbaikan disertasi ini.
4. Dr. H. Hadri Hasan MA., Prof. Dr. Suaidi Asyari, MA., P.hd, Dr. H. Hidayat, M.Pd., dan Dr. Fadlilah, M.Pd., Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Saifuddin Jambi disampaikan terima kasih atas kesempatan, dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan. Disampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap civitas akademika Universitas Darussalam Gontor atas segala bantuan dan dukungan dari proses awal studi hingga akhirnya studi ini berhasil diselesaikan.
5. Semua keluarga: Ibu Huriana, disampaikan terimakasih yang mendalam atas didikan, nasehat dan doa yang tulus yang selalu menyertai penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya disampaikan terimakasih kepada suami dan anak-anak kami: Farabi Akil Azra dan Averos Afwa Rahman, terimakasih atas pengertian dan pengorbannya, semoga menjadi manfaat dan berkah bagi keluarga kita aamiin.
6. Keluarga besar Khatib family terima kasih atas dorongan, motivasi dan semangat yang diberikan. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua.
7. Semua kolega, teman dosen, teman kuliah, dan semua pihak yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap hasil penelitian sederhana ini dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan keilmuan agama Islam di masyarakat. Kritik dan saran dari pembaca diharapkan untuk mengembangkan pemikiran yang lebih

komprehensif. Semoga Allah swt senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya aamiin.

Yogyakarta, Oktober 2018

Penulis

Zarfinayenti



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Yudisium.....	iii
Dewan Penguji.....	iv
Pernyataan Keaslian dan Bebas Plagiarisme	v
Pengesahan Promotor	vi
Nota Dinas	vii
Abstrak.....	xii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin	xxi
Kata Pengantar	xxv
Daftar Isi	xxviii
Daftar Tabel	xxxii
Daftar Lampiran	xxxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Pokok Permasalahan.....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Secara Teoritis.....	13
2. Secara Praktis.....	15
E. Kajian Pustaka	15
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metodologi Penelitian	34
1. Lingkup Penelitian	34
2. Jenis dan Sumber Data	34
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Analisis Data	37
H. Sistematika Pembahasan	39
BAB II : PEREMPUAN DAN POLITIK DI INDONESIA	41
A. Perempuan di Parlemen Sebelum Reformasi	41
B. Perempuan di Parlemen pada Masa Reformasi ...	52
C. Kuota dan Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2004	58
D. Perempuan dalam Legeslatif 2009-2014.....	63
E. Perempuan di Parlemen Pada Pemilu 2014.....	66

BAB III : DINAMIKA PERGERAKAN SOSIAL POLITIK	
PEREMPUAN JAMBI	69
A. Perempuan dalam Sejarah Kepemimpinan Jambi	
Kepemimpinan.....	69
B. Perempuan dalam Budaya Jambi	82
C. Perempuan Dalam Lembaga Swadaya	
Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial Politik	
Dan Keagamaan	91
1. Dalam Bidang Sosial Keagamaan	96
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPI	
(Koalisi Perempuan Indonesia)	114
D. Perempuan Dalam Partai Politik	119
E. Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan	
Perempuan di Propinsi Jambi	132
F. Visi Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jambi	136
BAB IV : PARTISIPASI PEREMPUAN DI PARLEMEN:	
PERAN, HAMBATAN , PELUANG DAN	
STRATEGI PENINGKATAN	149
A. Kondisi Objektif Perempuan di Parlemen Jambi.	149
B. Peran Perempuan Dalam Politik	171
C. Akses dan Peluang Perempuan dalam Politik.....	175
D. Hambatan dan Tantangan Perempuan	
di Parlemen	178
1. Pemilu Tahun 1999	178
2. Pemilu Tahun 2004	181
3. Pemilu Tahun 2009	186
4. Pemilu Tahun 2014	191
E. Faktor Penghambat Partisipasi.....	192
1. Hambatan Kultural	201
2. Hambatan Historis	204
3. Hambatan Normatif	206
4. Hambatan Domestik	218
5. Hambatan Pendidikan.....	220
F. Strategi Peningkatan Partisipasi Politik	221
1. Strategi Jangka Pendek.....	223
2. Strategi Jangka Panjang.....	226
BAB V : PENUTUP	233
A. Kesimpulan	233

B. Saran.....	235
DAFTAR PUSTAKA.....	237
LAMPIRAN.....	243
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	247



DAFTAR TABEL

- Tabel II.1 Jumlah Perempuan di Parlemen sejak pemilu 1955 (persen), 52
- Tabel II.2 Perempuan dalam institusi Politik Formal 2001, 57
- Tabel II.3 Perempuan dalam Lembaga Legislatif 1955-2004, 58
- Tabel II.4 Perempuan pada Pemilu 2004 berdasarkan Partai Politik (Pemilu 2004), 62
- Tabel II.5 Perempuan dalam Legislatif 2009-2014, 65
- Tabel IV.1 Data Keterwakilan Perempuan di Legislatif tahun 2004-2009, 154
- Tabel IV.2 Perempuan di Lembaga Eksekutif tahun 2007, 155
- Tabel IV.3 Persentase penduduk berumur 10-44 tahun yang buta huruf, 155
- Tabel IV.4 APS Menurut Kelompok Umur, 156
- Tabel IV.5 Persentase penduduk berumur 10 th keatas menurut pendidikan yang ditamatkan, 156
- Tabel IV.6 Kunjungan Penduduk Perempuan Menurut Penolong Kelahiran dan Daerah Tempat Tinggal, 157
- Tabel IV.7 TPAK Bagi Penduduk Yang Berumur 10 Tahun Keatas, 157
- Tabel IV.8 Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Dengan Jumlah Jam Kerja, 158
- Tabel IV.9 Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 158

- Tabel IV.10 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, Provinsi Jambi, 2009, *159*
- Tabel IV.11 Jumlah Keterwakilan Perempuan Yang Duduk di DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi hasil Pemilu 2009, *159*
- Tabel IV.12 Jumlah Keterwakilan Perempuan Yang Duduk Di DPRD Provinsi Jambi Tahun 2009, *160*
- Tabel IV.13 Jumlah Keterwakilan Perempuan di Bidang Legislatif di Provinsi Jambi Tahun 2009, *160*
- Tabel IV.14 Jumlah Kepala Desa Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2009, *162*
- Tabel IV.15 Jumlah Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Pendidikan di Bidang Eksekutif (PNS Pemda) di Provinsi Jambi tahun 2009, *163*
- Tabel IV.16 Posisi perempuan Dalam Partai Politik di Provinsi Jambi, *170*



DAFTAR GAMBAR

- Gambar IV.1 Data KPU Provinsi Jambi, 153
- Gambar IV.2 Persentase Jenis Kelamin Hasil Pemilu DPRD Provinsi Jambi Tahun 2014, 163
- Gambar IV.3 Alokasi Kursi DPRD Prov Jambi Per Dapil, 166
- Gambar IV.4 Perolehan Kursi Parpol Untuk DPRD Provinsi Jambi, 166





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk dari tindakan demokratis adalah partisipasi aktif warga negara dalam menjalankan tugasnya sebagai warga negara. Menurut Larry Diamond, harus ada jalan yang banyak bagi bagi “rakyat” untuk mengekspresikan kepentingan dan keinginan mereka tidak hanya untuk mempengaruhi kebijakan, tetapi juga untuk secara terus berkontinu memantau dan memperhatikan pelaksanaan kekuatan negara.¹ Sebagai upaya melibatkan “rakyat” dalam pembentukan kebijakan dan mengontrol kekuasaan negara, lembaga-lembaga demokratis seperti partai politik, parlemen, sistem pemilihan umum dan pemisahan kekuasaan harus dibentuk.² Apapun tingkat peran warga negara, suasana demokrasi yang sesungguhnya tergantung pada partisipasi aktif dan penuh kesadaran oleh warganya. Sebagai inti untuk melakukan partisipasi warga negara maka hak-hak dasar yang tidak bisa ditolak, seperti kebebasan berbicara, berserikat dan beragama.

Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis secara damai atau kekerasan. Dengan begitu unsur penting dalam konsep partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam proses pembuatan keputusan oleh pemerintah.³ Secara hakiki partisipasi adalah kemandirian. Artinya setiap individu yang melakukan kegiatan partisipasi haruslah berasal dari diri

¹Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*. (Baltimore dan London: The Johns Hopkins University Press, 1999), 219

²Bob S. Hadiwininata dan Christoph Schuck, “Pendahuluan: Memetakan Jalan Indonesia Menuju Demokrasi, Kerangka Teoritik.” Dalam *Demokrasi Indonesia Teori & Praktek*, ed. Bob Sugeng Hadiwininata dan Christoph Schuck. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 2

³Sugiarti, dkk, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. (Malang: UMM Press, 2003),60

sendiri.⁴ Untuk itulah partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sistem yang demokratis.⁵

Representasi dan akuntabilitas menjadi prasyarat bagi terwujudnya demokrasi yang bermakna bagi bangsa Indonesia.⁶ Maka dalam demokrasi perempuan bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari perempuan, termasuk juga memperhatikan kehidupan kaum perempuan agar terlepas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta memperlakukan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki karena demokrasi tidak mengenal jenis kelamin.

Pada masa reformasi dan setelah reformasi ini sesungguhnya merupakan peluang emas untuk mewujudkan kepentingan perempuan dan memperjuangkan keterwakilan mereka dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dalam negara demokrasi Partai politik merupakan wadah yang penting untuk partisipasi politik.⁷ Selain itu berbagai evaluasi juga telah dilakukan oleh banyak kalangan bahwa dalam proses demokrasi ini maka kepentingan perempuan tidak dapat diabaikan lagi.

Kebijakan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1999 khususnya melalui Inpres nomor 9 tahun 2000 dan kebijakan responsif gender lainnya adalah sebuah upaya untuk melakukan koreksi terhadap berbagai

⁴Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),7

⁵Alfian, *Politik Kebudayaan dan Manusia Indonesia* (Jakarta:LP3ES, 1980),1

⁶Sri Wahyuni \$ Hedwigis Esti R, *Pandangan Publik Tentang Keputusan Perempuan dalam Kancah Politik di Indonesia Studi Kasus Dosen dan Mahasiswa ABFII Perbanas. Dalam Gender And Politics.* (Yogyakarta: Kerjasama PSW Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana UGM dan Penerbit Tiara wacana 1999), 201

⁷Ani Widyani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005), 24.

kekeliruan kebijakan pembangunan pada masa lalu yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan dan kepentingan gender pada perempuan dan laki-laki.

Pengesahan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Pemilu nomor 12/2003 menandai pencapaian penting dalam perjuangan bertahun-tahun gerakan perempuan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang dimunculkan oleh para feminis ketika adanya *affirmative action* ini. Pertama, diperlukan intervensi struktural sebagai tindakan darurat untuk mengatasi ketimpangan gender dalam waktu yang cepat. Kedua, rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik sehingga dibutuhkan kuota bagi perempuan. Ketiga, nilai-nilai hidup perempuan mempunyai ciri khas tertentu, misalnya kepedulian pada isu kesejahteraan keluarga, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan dan lain-lain. Selain itu dalam banyak hal kaum perempuan bisa melakukan tindakan kooperatif, konsensus dan bertoleransi dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga bila dibawa ke dalam kehidupan politik, etika perempuan itu akan berdampak positif yaitu memiliki tingkat kepedulian tinggi yang bukan hanya menonjolkan keadilan.⁸

Lahirnya *affirmative action* ini menimbulkan perdebatan sehingga ada yang pro dan kontra. Sebagian politikus menganggap angin segar, tapi bukan angin surga.⁹ Politikus lainnya menunjukkan kontra dengan keterwakilan 30 persen.¹⁰ Partai Amanat Nasional menganggap kebijakan tersebut merupakan keharusan dalam negara yang demokratis.¹¹

⁸Gadis Arivia, "*Sekapur Sirih*" dalam *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas, 2005)

⁹Kalimat ini dilontarkan oleh *Khafifah Indar Parawansa*. Forum. No 46 23 Maret 2000, 34

¹⁰"Saya tidak setuju dengan adanya kuota 30% karena terkesan hanya pemberian belas kasihan, kata Megawati". Koran Tempo, Republika 12 Maret 2003

"Partai Amanat nasional tidak akan memandang itu rekomendasi enteng-enteng tapi suatu keharusan", kata Amin Rais. Republika 22 Pebruari 2003.

Pada perkembangan selanjutnya, Undang-undang nomor 2 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik mengakomodasi perempuan dalam kepengurusan partai minimal 30 persen lebih dari itu pasal 55 undang-undang tersebut mengatur tentang “Zipper System” dengan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap partai menempatkan satu orang perempuan di dalam daftar bakal calon yang terdiri dari tiga orang bakal calon. Atau setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon”. Sejalan dengan hal itu, Undang Undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik; “Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dari segi kepengurusan ditetapkan bahwa Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan paling rendah 30 persen keterwakilan perempuan” dan Partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30 persen yang diatur dalam AD dan ART partai politik masing-masing.¹²

Namun, sayangnya sedikit partai yang menjabarkan (ART) dalam partainya. Penelitian KPI menunjukkan hanya Partai Amanat nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan yang menyebutkan afirmatif bagi perempuan dalam AD dan ARTnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera hanya menjadikan kebijakan itu sebagai kebijakan internal yang belum dicantumkan dalam AD dan ART.

Menurut Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Masruchah: “Sebagai lembaga artikulasi politik dan pelaksanaan pendidikan politik, parpol seharusnya peka dengan isu gender. Masih berlangsungnya diskriminasi terhadap perempuan dalam partai membuat upaya

¹²UU No 2 tahun 2008. Partai Politik pasal 2 ayat 2 dan ayat 5 pasal 20.

meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan untuk segera dilakukan¹³.

Tingkat partisipasi politik masyarakat menjadi indikator demokratis tidaknya sebuah negara. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran untuk membuka kesempatan mendorong dan mengajak para anggota partai dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Dengan demikian partai politik berkontribusi dalam upaya menyelenggarakan proses politik yang demokratis.

Permasalahan mendasar justru karena rendahnya akses, partisipasi dan kontrol perempuan atas sumberdaya pembangunan serta penerima manfaat dalam pembangunan. Di samping itu masih adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan yang tidak hanya merugikan perempuan itu sendiri secara sosial, melainkan dalam konteks yang lebih luas yaitu segi ekonomi dan politik.

Sebagai salah satu negara yang demokratis sekarang ini sudah ada beberapa perempuan Islam Indonesia yang terlibat dalam partai politik bahkan menjadi ketua partai politik. Misalnya Megawati Soekarno Putri dari PDIP, Metutia Hatta dari PPK, Aisyah Amini dari PPP, hanya saja posisi mereka masih sedikit di legislatif maupun Yudikatif, angka keterwakilan perempuan hanya 9,8 persen padahal partisipasi perempuan sebagai pemilih lebih besar dari laki-laki, yakni 50,8 persen, sedangkan laki-laki hanya 48,1 persen.

Sehubungan dengan sedikitnya kaum perempuan yang aktif di dunia politik, Aisyah mengidentifikasi beberapa faktor. Pertama, adalah masalah pendidikan, perempuan lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki. Kedua, adalah kesalahan persepsi mengenai kotornya dunia politik, politik adalah dunia yang keras dan tidak cocok dengan sifat perempuan yang anggun.

¹³Masruchah, Platform Parpol” Partai Politik Cenderung tidak Pedulikan Perempuan”. Kompas Senin 23 Maret 2009. 4

Oleh karena itu Aisyah Amini mengusulkan agar partisipasi perempuan di dalam dunia politik ditingkatkan. Upaya pertama adalah mengoreksi persepsi bahwa politik bertentangan dengan sifat kewanitaan. Dan kedua adalah kaum perempuan harus menunjukkan pengabdian dan kemampuannya, khususnya dalam dunia politik. Jalan keluar ketiga, adalah perempuan harus mengembangkan potensi yang mereka miliki melalui dunia pendidikan, pengalaman, dan pengabdian, mereka ingin diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas.¹⁴

Menurut Aisyah Amini, keterlibatan perempuan dalam kancah politik telah meningkat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini berkat dedikasi para pemimpin nasional dan diperkuat oleh keputusan MPR tahun 1978 yang secara spesifik memasukkan pasal mengenai peranan perempuan dalam GBHN. Pelibatan kaum perempuan juga terinspirasi oleh keputusan PBB tahun 1975 yaitu mengenai “*International Woman Year*” dan pada dekade 1970-an mengenai “*International Woman Role*”.¹⁵

Walaupun secara keseluruhan banyak diketahui bahwa perempuan kurang terpresentasi dalam parlemen pada hampir semua negara di dunia, terlepas dari progresivitas pendidikan mereka, sebagaimana dikatakan oleh Miki Caul bahwa perempuan dalam parlemen baru mencapai 12 persen dari keseluruhan anggota parlemen.¹⁶

Aspirasi dan kepentingan perempuan akan terus terkalahkan oleh berbagai aspirasi dan kepentingan umum lain yang lebih keras disuarakan karena dua kemungkinan pertama, aspirasi dan kepentingan khas perempuan tidak

¹⁴Siti Musdah Mulia dan Marzain Anwar, *Kondisi Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2001), III.

¹⁵Aisyah Amini. Merupakan aktivis perempuan yang sangat vokal dari Partai Persatuan Pembangunan.

¹⁶Miki Caul, *Woman Representation in Parliament: The Role of Political Parties: Party Politics Vit5No1*, (London: Sage Publication, 1999), 79-98.

dikenali atau diketahui oleh partai-partai yang sangat didominasi oleh laki-laki yang berkompetisi dalam arena politik. Kedua, perempuan yang berkiprah dalam arena politik tidak dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan khas dari kelompok mereka sendiri karena jumlah mereka yang minoritas dalam berpolitikan.¹⁷

Berbagai kajian gender dan politik telah menunjukkan bahwa aspirasi dan kepentingan khas perempuan sulit untuk direpresentasikan oleh mereka yang tidak pernah mengalami pengalaman khas perempuan.¹⁸ Oleh sebab itu mengharap laki-laki yang mendominasi partai politik untuk mengangkat apalagi memperjuangkan kepentingan yang tidak mereka kenali atau ketahui sama artinya mengharapkan hujan dimusim kemarau. Karena sangat sulit mengharapkan laki-laki memperjuangkan aspirasi dan kepentingan khas perempuan di arena perpolitikan formal.

Selain persoalan kualitas yaitu rendahnya representasi atau keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik terdapat juga persoalan kualitas. Partisipasi perempuan di bidang politik selama ini, jika ada, hanya terkesan memainkan peran sekunder. Mereka hanya dilihat sebagai pemanis atau pengembira, dan ini mencerminkan rendahnya pengetahuan mereka di bidang politik. Persoalan sensitivitas atau kepedulian terhadap isu-isu perempuan seperti soal kekerasan negara terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pelecehan seksual, gizi anak, perdagangan orang bukan menjadi agenda utama bagi para penentu kebijakan. Faktanya, dimensi kemanusiaan dari perempuan sebagai manusia yang harus dihargai hak-haknya ditempatkan pada wilayah yang marginal.¹⁹

¹⁷Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Kompas Media Nusantara.2005), 63

¹⁸*Ibid.*, 64

¹⁹*Ibid.*, 23

Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya pernah memiliki 12.2% pada awal tahun 1990-an. Akan tetapi pada tahun 1995 turun menjadi 11,4% dan sangat disayangkan justru pada saat pintu demokrasi sedang diteriakkan menjelang pemilu tahun 1998 presentasi perempuan hanya mencapai 8%. Begitu juga hasil pemilu 2004 gagal memenuhi kuota 30% karena hanya menempatkan 57 orang perempuan di parlemen.

Pada Pemilu 2014 terjadi penurunan jumlah perempuan di parlemen. Jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pada pemilu 2014 hanya sebesar 17 persen atau 97 kursi dari 560 anggota DPR. Sementara pada pemilu 2009, presentase perolehan kursi perempuan di DPR RI mencapai 18 persen, artinya terdapat penurunan sekitar 1 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pencalonan caleg perempuan tidak berbanding lurus dengan keterpilihan caleg perempuan. Pada Pemilu 2009 pencalonan caleg perempuan tercatat sebesar 34,86 persen dengan jumlah perempuan yang terpilih sebanyak 18,03 persen. Sementara pada Pemilu 2014, pencalonan caleg perempuan meningkat menjadi 37,27 persen dengan jumlah perempuan terpilih turun menjadi 17,32 persen.²⁰ Kewajiban parpol untuk mencalonkan minimal 30 persen caleg perempuan dari seluruh jumlah caleg perempuan dari seluruh jumlah caleg di setiap daerah pemilihan seperti diamanatkan UU Pemilu dan keberadaan PKPU yang memungkinkan KPU untuk mencoret parpol dari kepesertaan pemilu di dapil yang jumlah caleg perempuannya kurang dari 30 persen, memang berhasil meningkatkan persentase pencalonan caleg perempuan, akan tetapi hal ini tidak secara otomatis juga meningkatkan keterpilihan perempuan.

Presentasi perempuan di DPRD Provinsi, kabupaten dan kota juga tidak kalah sedikit. Pada Pemilu legislatif tahun 2004 di Provinsi Jambi misalnya hanya ada 6 orang perempuan

²⁰Anita Dhewy, "Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014," *Jurnal Perempuan : Pemilu , Agama & Status Perempuan*. Vol. 19 No 3, Agustus 2014, 102

di antara 45 anggota parlemen (13,33%). Jauh tertinggal dari laki-laki yang mencapai angka 86,67%. Jumlah ini agak meningkat bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketika gendering reformasi baru dibunyikan pada pemilu 1999 yang hanya menempatkan tiga orang perempuan sebagai legislator berbanding dengan empat puluh dua orang laki-laki.²¹ Hal ini tentu saja sangat menyedihkan mengingat DPRD merupakan lembaga terhormat karena merupakan jelmaan kedaulatan rakyat dan secara sederhana merupakan jembatan bagi masyarakat di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingannya, yang selanjutnya akan diartikulasikan dalam sebuah kebijakan politik sebagai mandat dan dasar bekerja bagi para eksekutif. Di samping itu bila mengacu pada terfokusnya isu feminisme di daerah kota terutama wilayah ibu kota negara yang bisa menjadi bahaya tersendiri dari diberlakukannya desentralisasi cenderung memiliki efek negatif. Isu gender dalam desentralisasi perlu lebih ditekankan dan dijadikan agenda tersendiri terutama dalam partai politik di daerah sehingga tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia politik bahkan dalam menempati posisi strategis.

Dipilihnya Jambi sebagai lokasi penelitian dengan berbagai pertimbangan diantaranya adalah penulis menjadi saksi nyata terhadap proses rekrutmen perempuan dalam partai politik di Provinsi Jambi. Di samping itu penulis juga menjadi pendamping beberapa orang politisi perempuan yang menjadi calon legislatif di provinsi Jambi.²²

Jambi yang identik dengan Melayu dan sekarang menjadi salah satu provinsi di Indonesia merupakan wilayah

²¹Lembaga studi Pengembangan Sumber Daya Manusia DPRD Provinsi Jambi, 2000. *Profil Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2000*. Lihat penelitian Zarfina Yenti, 2004, *Perempuan dalam Partai Politik, Analisis terhadap Kegagalan Perempuan dalam Memenuhi Kuota 30% di DPRD Provinsi Jambi*

²²Observasi yang penulis lakukan semenjak Pemilu tahun 1999 sampai pada Pemilu tahun 2014

yang terkenal dalam literaturkuno. Nama negeri ini sering disebut dalam prasasti-prasasti dan juga berita-berita Cina. Sebagaimana disebutkan Arkeolog Bambang Budi Utomo “Melayu pertamakali muncul dalam sejarah melalui berita Tionghoa abad ke 7, kemudian dalam prasasti Tanjore dari India Selatan pada 1030 yang mencantumkan “Malayuir“. Dalam berita-berita Tionghoa nama Melayu disebutkan sebanyak tujuh kali, masing-masing dalam buku *che-fu-yuan-gui, Datang-xi-yu-qiu-fa-gao-seng-chuan (Biografi Pendeta-pendeta Mulia dari Tang Raya yang Mengejar Dharma di India), Nan-hai-ji-gui-nei-fa-chuan (Keadaan Agama Buddha di lautan Selatan, Dititipkan kepada yang Pulang).*²³

Kebudayaan Melayu merupakan salah satu kebudayaan tertua di Nusantara dan sudah mengenal tulisan lebih dari 1500 tahun. Istilah Melayu pertama kali muncul pada 671 M dan telah dicatat oleh seorang Tiongkok bernama I-Tsing yang saat itu bermukim di Kerajaan Malayu (Jambi) yang terletak di lembah Batanghari untuk memperdalam pengetahuan mengenai filsafat agama Buddha. Kemudian ia pindah ke Kerajaan Sriwijaya yang pusatnya berada di lembah sungai Musi di sekitar Palembang untuk menyalin dan menerjemahkan naskah-naskah sansekerta.²⁴

Jambi semenjak dahulu merupakan wilayah yang heterogen penduduknya sebagaimana dikatakan oleh Elsbeth Locher-Scholten “Jambi menyimpang dari pola umum Melayu. Sultan berkuasa, bukan atas populasi homogen Melayu dengan asal usul Melayu yang sama, tetapi atas banyak kelompok etnis yang berbeda-beda“²⁵. Heterogeni penduduk Jambi

²³Bambang Budi Utomo. *Kebudayaan Zaman Klasik Indonesia di Batang Hari* (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi 2011), 17-18

²⁴Uli Kozok, *Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah:Naskah Melayu Yang Tertua* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 1

²⁵Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial. Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imprealisme Belanda*. (Jakarta: Banana KITLV, 2008), 54

berlangsung sampai sekarang sehingga terkadang kesulitan mendefinisikan antara penduduk asli dengan penduduk yang bukan asli Jambi.²⁶

Tidak hanya heterogen dari sisi suku, di Jambi juga terdapat beberapa agama. Selain Islam yang mayoritas dianut penduduk Jambi, terdapat agama-agama lain, termasuk kepercayaan lokal sebagaimana yang dianut orang Rimba. Keragaman ini tentu saja menjadi modal dasar bagi provinsi Jambi dalam mengembangkan multikulturalisme.

Demikian juga ketika berbicara tentang kepemimpinan perempuan di Jambi. Dalam sejarah Melayu Jambi, Kerajaan Melayu Jambi pernah dipimpin oleh seorang perempuan yang diyakini berasal dari keturunan Adityawarman dari Sumatera Barat bernama Puteri Selaras Pinang Masak.²⁷ Namun, dalam perkembangan selanjutnya kepemimpinan perempuan di Jambi tidak lagi terdengar sebagaimana adanya Putri Selaras Pinang Masak.

Berdasarkan data yang ada sebenarnya Provinsi Jambi adalah daerah potensial untuk mengembangkan potensi perempuan dalam partisipasinya dalam bidang politik, karena jumlah penduduk provinsi Jambi hampir 50 % adalah perempuan. Dengan jumlah total 2.479.469 terdiri 1.256.400 laki-laki, 1.222.989 perempuan.²⁸

²⁶Menurut sensus penduduk tahun 2000, penduduk Provinsi Jambi terdiri atas setidaknya berturut-turut terbanyak, suku Melayu, Jawa, Kerinci, Minangkabau, Banjar, Sunda, Bugis dan lain-lain termasuk Tionghoa dan Batak. Suku yang berbeda tersebut tumbuh dan berkembang bersama kebudayaan masing-masing.

²⁷Berdasarkan manuskrip local yang dijadikan rujukan tentang sejarah Jambi seperti Undang undang Piagam Pencacahan Jambi (UPPJ) maupun Inilah Sejarah Kerajaan Jambi sejak 700 h (ISRJ) yang ditulis oleh Ngebith Sutho Dilago, sejarah muncul dan berkembangnya kerajaan Jambi berawal dari kedatangan seorang yang bernama Ahmad Baru yang kemudin menikah dengan raja Jambi keturunan Putri Selaras Pinang Masak. UPPJ, 6 dan ISRJ, 1. Lihat juga Ali Muzakkir “ Sejarah dan Dinamika Islam di Jambi Berdasarkan Sumber-sumber Lokal. *Jurnal Seloko*, 1

²⁸Badan Statistik Jambi.

Namun sayangnya dari pengamatan sementara hanya sedikit jumlah perempuan di provinsi Jambi yang berpartisipasi dalam bidang politik baik di eksekutif, legeslatif maupun yudikatif.²⁹ Bahkan pada kasus pemilu legislatif pada tahun 2004 dan 2009 dan pemilu 2014 banyak parpol yang mendingkan calon legislatif perempuan dari pusat guna untuk memenuhi kuota 30 persen kuota perempuan dalam daftar caleg di DPR RI dapil Provinsi Jambi. Dari 49 orang caleg perempuan dari provinsi jambi 25 persen didroping dari pusat kasus ini notabene terjadi pada partai-partai besar seperti Partai Demokrat, PAN dan PDIP.³⁰

Kasus di atas sangat disayangkan karena menunjukkan seolah-olah perempuan Jambi tidak mampu terlibat dalam politik. Selain itu caleg yang didroping dari pusat bila terpilih dikhawatirkan tidak mengetahui persoalan daerah, kesulitan dalam mading daerah, tidak konsisten dengan konstituen karena tidak memiliki hubungan emosional.

Sementara itu untuk perkembangan selanjutnya sangat disayangkan legislator perempuan yang terpilih di DPR RI dari Partai Amanat Nasional mengundurkan diri dari legeslatif karena sepuluh kali tidak menghadiri sidang pleno dalam satu triwulan karena alasan privasi. Hal ini tentu saja sangat mengecewakan konstituen yang berharap banyak pada legislator perempuan tersebut.³¹

Untuk itulah penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap, bagaimanakah peran, peluang dan tantangan

²⁹Observasi Tanggal 9 April 2009

³⁰Partai Demokrat bahkan berhasil menempatkan legislator perempuan yang didroping dari pusat di DPR RI. Hal ini terjadi karena legislator ditempatkan pada nomor urut satu sementara itu di Provinsi Jambi banyak yang memilih partai ketimbang nomor urut sehingga otomatis sang legislator dapat melenggang ke senayan.

³¹Ratu Munawaroh adalah legislator perempuan yang menempati nomor urut satu dari Partai Amanat Nasional mengundurkan diri karena dianggap bolos dari beberapa kali sidang pleno di DPR RI. Sehingga ketika itu beliau dijuluki sebagai "Ratu Bolos". Hal inilah yang menurut Indra Sukandis yang menyebabkan beliau mundur dari keanggotaannya sebagai legislator.

perempuan dalam politik di provinsi Jambi semenjak reformasi sampai Pemilihan Umum 2014?

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada peran, peluang dan tantangan perempuan dalam bidang politik di Provinsi Jambi dari semenjak munculnya reformasi tahun 1998 sampai Pemilihan Umum 2014 studi kasus beberapa politisi perempuan. Di samping itu penelitian ini terbatas mengungkapkan partisipasi politik perempuan dalam politik formal seperti partisipasi di bidang legeslatif. Sedangkan yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini berkaitan dengan peran perempuan di legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran.

C. Pokok Permasalahan

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Peran, Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Politik di Provinsi Jambi Semenjak Reformasi sampai Pemilihan Umum 2014, studi kasus beberapa politisi perempuan di Provinsi Jambi”? Dari rumusan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah peran perempuan dalam bidang politik di Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah peluang dan tantangan perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik di Provinsi Jambi?
3. Bagaimanakah strategi yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik di provinsi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berupaya untuk melakukan elaborasi lebih lanjut tentang partisipasi perempuan dalam

politik dengan beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya dengan mempergunakan teori partisipasi. Dalam teori partisipasi tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan sosiologi politik. Yang mengemukakan bahwa konsep-konsep pokok mengenai politik adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decisionmaking*), kebijakan (*policybeleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).

Penelitian ini juga menggunakan teori gender yang mengajarkan bahwa tiadanya kesadaran gender dalam kebijakan dan perencanaan menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketidakefisienan, ketidaksejahteraan dan ketidakadilan. Berkaitan dengan hal tersebut adalah seperti yang dikemukakan oleh para feminis, marginalisasi dan eksklusi perempuan dalam demokrasi deliberative menyebabkan perempuan tidak memiliki kapasitas untuk berpartisipasi secara sebagai warga negara aktif.

Tiadanya kesadaran gender yang bergandengan dengan eksklusi perempuan menghasilkan pembuatan kebijakan yang tidak menyejahterakan, tidak saja perempuan, namun seluruh warga negara. Perspektif feminis tentang kewarganegaraan meragukan sistem demokrasi yang mengedepankan sifat patriarkinya dengan menggugat dua hal, yaitu karakteristik seksisme dalam teori demokrasi dan sikap/perlakuan teori-teori tersebut terhadap perempuan.³²

Penelitian ini juga akan mengembangkan teori pemberdayaan yang mengemukakan empat indikator yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

³²Marion Smiley, "Gender, Democratic Citizenship v. Patriarchy: A Feminist Perspective on Rawls", *Fordham Law Review*, 2004 Vol. 72, Issue 5, 1599-1627. Diakses dari <http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol72/iss5/11>. Diakses pada 1 Januari 2015

2. Secara Praktis

Dalam dataran praksis, manfaat yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa dengan diketahuinya peran, peluang dan tantangan perempuan dalam politik di provinsi Jambi kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan bagi perempuan dan masyarakat dalam memilih wakil mereka di legislatif. Di samping itu juga dapat menjadi pedoman bagi pembuat keputusan dalam hal ini pemerintah provinsi Jambi dalam membuat kebijakan yang responsif gender.

E. Kajian Pustaka

Persoalan tentang perempuan dan politik sebenarnya sudah banyak dipersoalkan. Terutama dari kalangan ulama. Misalnya Quraish Shihab menulis tentang Konsep wanita menurut Alquran, hadits dan sumber-sumber Ajaran Islam dalam Lies Marcoes dan J.H. Meulleman (ed.) *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Hanya saja Quraish Shihab menggunakan pendekatan yang lebih teologis tanpa mengkaitkan unsur sosiologi perempuan. Fatima Mernisi pernah meneliti tentang *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* (terj. *The Forgotten Queens of Islam*). Dalam penelitiannya Fatima mengungkapkan bahwa sebenarnya dalam Islam sudah banyak yang memimpin suatu negara itu adalah perempuan. Pendekatan yang dipakainya adalah pendekatan sejarah³³. Qosim Amin menulis tentang *Tahrir al-Mar'ah*. Dalam tulisannya Qosim lebih menekankan pada hak-hak perempuan yang selama ini terlupakan terutama di kalangan Arab.³⁴ Asghar Ali Engineer meneliti tentang “*Hak-hak Perempuan dalam Islam*“. Di dalamnya menerangkan tentang apa-apa saja yang menjadikah perempuan baik dari segi ekonomi, kesehatan, sosial budaya maupun politik terutama yang berkaitan dengan penafsiran-penafsiran ayat dan Hadits yang

³³Fatima Mernisi. *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* (Terj. *The Forgotten Queens of Islam*) (Bandung: Mizan, 2000)

³⁴Qassim Amin. *Tahrir al-Mar'ah*. (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990)

menjadikan alasan mengapa perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah.³⁵ Siti Hariti Sastriyani (ed.) *Gender and Politics* yang merupakan kumpulan tulisan atau makalah yang ditulis beberapa orang guna melihat perkembangan Gender dan politik terutama di Indonesia. Mansour Fakih menulis tentang *Analisis Gender & Transformasi Sosial* di dalam tulisannya Mansour mencoba mengaitkan analisisnya dengan beberapa teori sosial seperti yang dicetuskan oleh Kark Mark dengan teori Kelas dan Antonio Gramsci dan Louis Althusser yang membahas ideologi dan kultural serta menggugat keduanya karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan dan beberapa aliran lainnya.³⁶

Dalam tulisan lain yang berkaitan dengan perempuan Ann Brooks mengungkapkan serta menunjukkan jalan bagi sebagian perempuan untuk melakukan kritik dan otokritik dari dalam dan dari luar gerakan feminis yang memberikan suara lain bagi gerakan perempuan untuk memperbaiki kehidupannya, baik dalam lingkungan kerja maupun keluarga.

Menurut Brooks dalam bab pendahuluan karyanya menyatakan bahwa:

“Di dalam prosesnya posfeminisme memfasilitasi konsepsi pluralistik yang berbasis luas perihal penerapan feminisme, dan memusatkan perhatiannya pada tuntutan budaya yang termarginalkan, diaspora, dan terkoloni bagi suatu feminisme non hegemonik yang mampu memberikan suaranya pada feminisme lokal, pribumi dan poskolonial. Dengan demikian ada harapan untuk memperbaiki nasib perempuan kearah yang lebih baik.³⁷

³⁵ Asghar Ali Engineer. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj. Farid W dan Cici Farkha. (Yogyakarta: LSPPA 1994)

³⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSIST Press, 2008)

³⁷ Ann Brooks, *Posfeminisme & Cultural Studies*. Terj. Post feminisme: Feminism, *Cultural Theory and Cultural Forms*. (Yogyakarta: Jalasutra, 2009)

Tulisan yang berkenaan dengan kuota 30 persen atau *afirmatif action* ditulis oleh Nurazizah. Dalam disertasinya yang berjudul “*Perwakilan Politik Perempuan studi Hambatan Pemberlakuan Kuota di Indonesia*”. Nurazizah melihat banyak hambatan yang dihadapi oleh caleg perempuan meskipun telah diberlakukannya *afirmatif action*. Penelitiannya didorong oleh fakta yang menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD serta kecurigaan akan tingginya bias gender dalam prinsip-prinsip politik demokrasi, perwakilan, system pemilu hingga proses penjurangan caleg yang berakibat pada terhambatnya kebijakan kuota perempuan. Azizah menggunakan analisis *Critical Discourse Analysis (CDA)*. Yang merupakan bagian dari metode analisis wacana. Bagi ilmu sosiologi wacana menunjukkan pada hubungan antara pemakaian bahasa dan konteks sosial.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Nurazizah dengan menggunakan perspektif feminis, penelitian politik feminis selalu didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang dihadapi perempuan. Menurut Reinharz feminisme memang tidak terbuka untuk semua, namun cenderung menggunakan pendekatan/*approach* (*critical approach*) karena penelitian pada umumnya bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial³⁸.

Temuan disertasi Nurazizah menunjukkan bahwa gerakan perempuan Indonesia mengalami kesulitan dalam membentuk identitas dirinya. Pemberlakuan kuota yang efektif menuntut identitas perempuan sebagai satu kelompok yang mempunyai kekuatan yang diperhitungkan dalam politik. Meski demikian memunculkan identitas perempuan bukanlah sesuatu yang mudah. Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam gerakan-gerakan reformis sosial, politik dan moral tidak otomatis akan meningkatkan kepedulian terhadap hak

³⁸Nurazizah. Disertasi. Perwakilan Politik Perempuan Studi tentang Hambatan Pemberlakuan Kuota di Indonesia. (Universitas Gajah Mada, 2011)

perempuan. Banyak perempuan yang lebih peduli terhadap masalah moral dan keagamaan daripada masalah ketimpangan gender.

Dalam tulisan lain Ani Widayani Soetjipto menulis tentang “Politik Perempuan Bukan Gerhana” merupakan kumpulan dari esai-esai pilihan. Buku ini memuat tentang perjuangan politik perempuan Indonesia dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dan mengubah tata cara pemilihan legislatif. Isi buku ini merupakan kombinasi hasil riset dan pengalaman advokasi dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan Indonesia. Seluruh tesis dasar dalam buku ini adalah perlunya tindakan afirmatif (*Affirmative action*). Tentu saja terdapat perbedaan yang mendasar antara buku ini dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis lebih menekankan pada kasus yang terjadi di Provinsi Jambi dengan mengemukakan beberapa orang politisi sebagai sampel.

Zarfina Yenti pernah melakukan penelitian pada tahun 2004 tentang “*Perempuan dalam Partai Politik Analisis Kegagalan Perempuan Dalam Memenuhi Kuota 30% di DPRD Provinsi Jambi*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada tahun 2004 hanya sedikit perempuan Jambi yang terlibat dalam partai politik sehingga partai kesulitan dalam menempatkan perempuan di calon legislatif. Dan walaupun ada perempuan yang menjadi calon legislatif itu ditempatkan pada nomor urut buncit. Penelitian ini jelas sekali berbeda dengan disertasi ini karena sumber datanya hanya terbatas pada pemilu legislatif pada tahun 2004, sedangkan penelitian ini dari reformasi sampai pada Pemilu 2014.

Adapun tulisan yang berkaitan dengan Sosiologi Politik, Maurice Duverger melihat bahwa fenomena politik atau kekuasaan yang mengandung dimensi-dimensi antagonisme/konflik dan integrasi terjadi di berbagai macam bentuk komunitas manusia-bangsa, masyarakat internasional, serikat buruh, elite, kota desa. Menurut Duverger, sosiologi politik adalah studi tentang fenomena kekuasaan di dalam

setiap pengelompokan manusia, bukan hanya di dalam negara (*nation-state*). Masing-masing kelompok manusia mewujudkan ke dalam struktur, yaitu suatu kerangka di mana aspek-aspek konflik dan integrasi dari kekuasaan saling memainkan peranan.³⁹

Sesungguhnya belum cukup banyak karya tulis mengenai Jambi. Akan tetapi ketika berbicara tentang Jambi tidak dapat dipisahkan dengan kajian tentang Sumatra. Literatur yang berkenaan dengan Jambi sebagaimana yang terdapat di jurnal *bijdragen tot de Taal Land en Volkenkunde* (BKI) yang diterbitkan KITLV, di nomor yang terbit pada 1894. Diantaranya beberapa kajian tentang Undang-undang Kesultanan Jambi dan studi-studi tentang orang rimba, yang di masa itu ditulis sebagai “Koeboe“.

Studi penting tentang Jambi adalah karya antropolog C.W Watson: *Kinship, Property and Inheritance in Kerinci, Central Sumatra* (University of Kent, 1992), Watson meneliti tentang kepemimpinan di dalam kekerabatan di salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jambi. Barbara Watson Andaya menulis *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in Seventeenth and Eighteenth Centuries* (1993) dan pada 1994 Elsbeth Locher-Scholten menulis *Sumatraans Sultanaat en kolonial Staat: De Relatie Djambi–Batavia (1830-1907)*.

Ada beberapa tulisan yang ditulis dalam konteks hubungan dengan kawasan di luar Jambi akan tetapi penelitian tersebut tetap menyebut Jambi sebagai bagian dari kajiannya seperti, Sriwijaya (O.W Wolters, 1974); Menuju Sejarah sumatra (Antony Reid, 2005) dan karangan William Marsden, *history Of Sumatra* (1783). Melalui buku yang ditulis tersebut, cap Anthony Reid terhadap karya William Marsden, terdapat kajian tentang Jambi hanya sedikit, yakni terkait Kerinci, sungai Tenang, Serampe (Serampas), batang aser (Batang Asai) dan Pangkalan Jambu. Itupun dengan berbagai catatan,

³⁹Maurice Duverger. *Sosiologi Politik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

dalam menulis Jambi Marsden tidak datang sendiri ke Jambi, melainkan mengandalkan catatan orang lain yang datang ke Jambi, yakni Charles Campbell (melalui surat menyurat) dan Hasting Dare (catatan harian). Hal senada kita temukan dalam karangan Edwin M. Loeb, *Sumatra: Its History and People* (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1972) dalam buku tersebut Loeb meneliti tentang orang rimba dan hanya sedikit menyebut tentang Jambi.

Sedangkan dari dalam negeri peneliti yang mengkaji tentang Jambi diantaranya Jang Aisjah Muttalib. Dalam disertasinya di Universitas Columbia Amerika Serikat yang berjudul *Jambi 1900-1916: From war to rebellion*. Peneliti lain seperti Bambang Purwanto menulis disertasi di SOAS, University of London dengan judul *From Dusun to Market: native Rubber Cultivation in Southern Sumatra, 1890-1940*. Demikian juga Muntholib yang meneliti tentang orang Rimba dalam disertasinya yang berjudul *Orang Rimba: Kajian Struktural-Fungsional Masyarakat Terasing di Makekal, Provinsi Jambi*. Namun, sayangnya penelitian tentang perempuan Jambi dalam kaitannya dengan politik sangat sedikit dilakukan. Jarang sekali peneliti tentang Jambi yang mengkaitkan kondisi sosial budaya serta adat istiadat Melayu Jambi dengan aktifitas politik perempuan Melayu Jambi. Maka dalam hal ini penulis mencoba untuk mengungkapkan tentang kondisi sosial politik tersebut dengan dinamika politik perempuan Jambi.

F. Kerangka Teori

Salah satu wujud perilaku politik adalah partisipasi politik. Menurut Samuel Huntington dan Joan M Nelson⁴⁰ partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara preman (private citizen) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Adapun indikatornya adalah berupa kegiatan

⁴⁰Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 5

bukan sikap-sikap dan kepercayaan, memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik, serta dilakukan oleh warga negara preman (biasa).

Menurut Herbert Mc Closky, “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela (voluntary) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.⁴¹ Maka dalam hal ini indikatornya berupa kegiatan-kegiatan sukarela, dilakukan oleh warga negara dan warga negara terlibat dalam proses-proses politik.

Kevin R Hardwic, mengatakan partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warganegara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.⁴² Adapun indikatornya adalah terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah. Terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik.

Ramlan Surbakti mengatakan bahwa partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.⁴³ Sesuai dengan istilah partisipasi maka partisipasi politik berarti keikutsertaan warganegara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi politik di atas, terdapat hal-hal substantif yang berkenaan dengan partisipasi tersebut yaitu: 1) kegiatan-kegiatan nyata. Maka hakekat partisipasi adalah kemandirian. Artinya setiap individu yang melakukan kegiatan partisipasi haruslah berasal dari diri

⁴¹Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)

⁴²Frank N. Magil (ed.) 1996. *International Encyclopedia of Government and Politics*. (Singapura: Toppan Company PTE LTD), 183

⁴³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 140.

sendiri. Kalau seorang individu melakukan karena didorong atau digerakkan oleh orang lain, atau dia merasa khawatir akan konsekuensi tertentu kalau tidak melakukan kegiatan “partisipasi”, maka apa yang sebenarnya terjadi adalah mobilisasi atau partisipasi yang digerakkan dari atas.

Maka, dalam hal ini partisipasi perempuan dalam politik adalah keikutsertaan atau berperan sertanya perempuan di dalam bidang politik baik sebagai pemilih, anggota legislatif, jabatan struktural di eksekutif maupun dalam hal yang berkaitan dengan masalah politik.

Dengan demikian menurut Partini, Partisipasi politik perempuan merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraannya. Perempuan sebagai warga negara yang baik mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbaikan dalam bidang politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Hak yang melekat pada kewarganegaraan perempuan, diharapkan bisa menjadi pelaku, pemeran, pembuat dan pembentuk kebijakan dan bukan hanya sebagai pemilih dan pendongkrak suara parpol, sehingga partisipasi bersifat dinamis dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pendukung kepentingan orang lain. Politik tidak berjenis kelamin, tetapi bangunan sistem politik dikonstruksi secara maskulin. Ini menguatkan stigma bahwa perempuan tidak punya kapasitas untuk bersaing dengan laki-laki. Budaya politik belum kondusif, belum ramah perempuan meski perempuan sebagai warga negara yang sah. Proses elektoral dalam sistem kewarganegaraan diharapkan tidak sekadar menghasilkan wacana keterwakilan, tetapi sebuah proses transformasi antara partai politik dan perempuan.⁴⁴

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bentuk umum dari partisipasi politik adalah

⁴⁴ Partini, “Partisipasi Politik Perempuan dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia,” *Jurnal Perempuan: Perempuan Politisi*, Vol 19 no 2 Mei 2014. Hlm 29

pemberian suara pada saat pemilihan umum (pemilu). Bentuk partisipasi politik paling minim seperti dapat dijumpai pada sistem politik demokratik sampai paling otoritarian sekalipun. Almond⁴⁵ membagi bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok berikut:

1. Kelompok kepentingan adalah mereka yang dapat duduk dalam badan pengawas pemerintahan (ombudsman), misalnya dalam masalah pelayanan publik.
2. Kelompok Anomik; mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun ke jalan karena rasa ketidakadilan. Pada saat seperti ini sangat memungkinkan kekerasan akan terjadi “*Lead to violence*“ karena kelompok yang ada dan terorganisasi semisal partai politik tidak mampu mewakili kepentingan mereka yang marah dalam sistem politik.
3. Kelompok non-asosional; sangat jarang sekali terorganisasi, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik pula. Perbedaan dari kelompok anomik adalah dasar mereka membentuk kelompok karena kesamaan kepentingan etnik, wilayah, agama, pekerjaan dan tali kekeluargaan.
4. Kelompok institusional; merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa partai politik, kosporat bisnis, legislitaf, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, dimana mereka mendukung untuk mewakili kepentingan kelompok.
5. Kelompok asosiasional: merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.
6. Kecenderungan sekarang ini timbul kelompok besar keenam, yaitu *civil society*, dimana kelompok

⁴⁵Gabriel A Almond dan Sidney Verba. *Budaya Politik, dan Demokrasi di Lima Negara*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan.

Sementara itu, Huntington dan Nelson⁴⁶ mengklasifikasikan, partisipasi dalam empat bentuk. Menurutnya dari berbagai studi mengenai partisipasi politik menggunakan berbagai klasifikasi yang berbeda-beda. Akan tetapi riset yang kebanyakan dilakukan sekarang membedakan jenis-jenis perilaku dalam empat bentuk:

1. Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara, memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam kegiatan pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil pemilihan.
2. Lobbying yang mencakup upaya-upaya, baik perorang maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil.
3. Kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi, yaitu tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat baik hanya seorang atau beberapa orang.

Surbakti⁴⁷ menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik seseorang yang

⁴⁶ Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang...*, 29

⁴⁷Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2003), 9

meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapat jaminan sosial dan kewajiban. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya

Di Indonesia partisipasi politik dan kesempatan untuk perempuan dalam kegiatan turut serta dalam pengambilan keputusan pada tingkat nasional dan daerah dapat diukur dari dua indikator. Pertama, keikut-sertaan perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Keterlibatan kaum perempuan di bidang politik merupakan indikasi bahwa dunia politik sesungguhnya bukan hanya milik kaum laki-laki di balik itu juga bukan merupakan ajang perebutan kekuasaan, melainkan tersirat upaya perjuangan, perlindungan dan jaminan hak-hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sehingga upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara akan terealisasi.

Kedua, disahkannya undang-undang Pemilu No. 2 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi UU no 2 tahun 2011 tentang Partai politik melalui sidang Paripurna DPR RI merupakan peluang emas dan telah memberikan harapan tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya mereka yang peduli dan telah berjuang untuk meningkatkan peran serta politik negeri ini. Harapan tersebut terletak pada dicantumkannya pasal 8 (1) di dalam UU Pemilu yang secara spesifik menyatakan di dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan, setiap partai politik peserta pemilu “dapat mengajukan calonnya dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%” ketentuan ini bersifat tidak meningkat, tidak ada sanksi bagi partai politik yang tidak melakukannya, dan bersifat jangka panjang. Implikasi dari

kuota yang bersifat sukarela ini adalah ia memberikan harapan dan sekaligus kewaspadaan untuk tetap memperjuangkan diterapkannya kuota 30% di dalam proses legislatif yang dilakukan oleh para partai politik peserta pemilu.⁴⁸

Dalam penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Dahlerup⁴⁹ dan Krook⁵⁰ merupakan penelitian paling komprehensif dan paling dirujuk dalam upaya untuk menjelaskan “Mengapa kuota perempuan terhambat”?

Menurut Dahlerup, desain kuota yang spesifik sangat menentukan keberhasilan pemberlakuan kuota”.... *the specific design of the system is crucial for the succesful implementation of quotas*”. Artinya desain kuota harus memuat sanksi bagi partai yang tidak mematuhi.

“In order to be effective, a quota system must be compatible with the electoral system in place and that quota rules-for etample, of 30 or 40 percent women on electoral lists-must be suplemented with rules concerning rank order as well as in the case of legislated quotas-effective legal sanctions”.

Penelitian Dahlerp tersebut jelas menekankan pada peran “sanksi” sebagai kunci keberhasilan pemberlakuan kuota. Namun, seolah-olah Dahlerup mengabaikan proses perumusan sanksi itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa “sanksi” merupakan hal yang sangat sulit disepakati dan dirumuskan di Indonesia karena *affirmative action* selalu dianggap bertentangan dengan prinsip “Let the best win”. Di benak kaum liberal kompetisi terletak antar individu (masing-masing) calon bukan kelompok perempuan secara aktif.

⁴⁸ UU No 2 Tahun 2008 tentang PEMILU yang telah direvisi menjadi UU no 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik.

⁴⁹Dahlerup, Drude and Lenita Freidenvall, *Electoral Quota System and Their Implementation in Europe*, (Wip, Women in Politics Research Centre, Departement of Political Science Stokholm University with International IDEA. 2008)

⁵⁰Mona Lena Krook.*Politizing Representation: Campaign for Candidate Gender Quotas Worldwide*. (Colombia University, 2005), 42

Ada beberapa teori tentang keterwakilan diantaranya teori yang dikemukakan Hanna Pitkin.

Menurut Pitkin ada empat pandangan yang berbeda mengenai keterwakilan: formal, simbolis, deskriptif, dan substantif. Keterwakilan formal merupakan keterwakilan yang terbentuk sebagai hasil pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum keterwakilan ada. Dua dimensi penting dalam keterwakilan formal adalah otoritas dan akuntabilitas. Representasi simbolis adalah pandangan tentang cara-cara seorang wakil mengatasnamakan konstituennya. Seorang wakil menjadi simbol yang merepresentasikan atau menghadirkan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada (tidak hadir). Representasi deskriptif merupakan sebuah bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada persamaan atau kemiripan antara wakil dan yang diwakili (konstituen/pemilih). Dalam representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan, dan dalam bertindak ia mengatasnamakan yang diwakilinya. Representasi substantif merupakan konsep keterwakilan yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang wakil adalah untuk kepentingan yang diwakilinya.⁵¹

Berdasarkan penelitian mengenai kepemimpinan perempuan di Asia, menurut Mary Katzenstein ada dua faktor utama yang menghambat rekrutmen kepemimpinan perempuan: kondisi sosial dan kelembagaan politik. Kondisi sosial yang diamatinya antara lain struktur kelas, kehidupan keagamaan dan budaya. Faktor kelembagaan politik yang ditelitinya antara lain adalah prosedur suksesi, sifat struktur partai yang pro atau kontra perempuan.⁵²

⁵¹Michael Saward. *Remainders and Opportunitties: recent Theories of Political Representation* dalam *The Representative Claim*. (Oxford: Oxford University Press, 2010),15-16 Dalam Nuri Soeseno, *Representasi Politik: Perkembangan dari Ajective ke Teori*, 36.

⁵²Nuri Soeseno. "Perempuan dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif", *Jurnal Perempuan* vol 19 no 2Mei 2014. 113

Berkaitan dengan peran perempuan di legislatif sesuai dengan tuntutan reformasi serta diberlakukannya UU 22/1999 dan 32/2004, maka fungsi DPR/DPRD berubah drastis. DPR/DPRD mendapatkan legitimasi peran sebagai unsur pemerintahan yang dapat mengajukan draf peraturan serta anggaran, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Sesuai dengan fungsinya DPR/DPRD mempunyai tugas penting yaitu: legislasi, penganggaran dan pengawasan.⁵³

Untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan maka diperlukan pemberdayaan perempuan. Paling tidak ada dua penulis yang berjalan paralel memperkenalkan sebuah pembangunan yang merekomendasikan transformasi dari pembangunan yang bias dan pembangunan yang berkesetaraan. Pertama adalah Amartya dalam bukunya *Development As-Freedom* yang mengamanatkan bahwa pembangunan pada dasarnya dan pada akhirnya adalah membebaskan individu-individu secara setara untuk mengembangkan kualitas diri dari kelompoknya. Kedua, Margaret Snyder dalam bukunya *Transforming Development: Women, Poverty and Politics* yang antara lain mengedepankan isu bahwa tujuan atau politik pembangunan adalah mengentaskan manusia dari kemiskinan dan manusia itu adalah manusia laki-laki dan manusia perempuan. Maka dalam hal ini Nursahbani Katjasungkana mengemukakan ada empat indikator pemberdayaan:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumberdaya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan

⁵³Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Periode 2014-2019*, 2014, 5

kontrol atas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya tersebut.

4. Manfaat, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumberdaya atau pembangunan secara sama dan setara.⁵⁴

Gunawan Sumodiningrat menambahkan bahwa untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan. Pertama, pemihakan artinya perempuan sebagai pihak yang hendak diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki. Kedua, penyiapan artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat. Ketiga perlindungan artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.⁵⁵

Kelemahan dari strategi ini memudahkan perempuan untuk terjebak dalam paradigma yang disebut Women in Development (WID) yaitu menjadikan perempuan dalam posisi eksklusivitas dalam pembangunan yang pada akhirnya menjebak perempuan dalam strepotifikasi dan marjinalisasi. Oleh karena itu pemberdayaan dan strateginya harus diletakkan dalam relasi antar pria yang menjadi core dari paradigma gender and development (GAD)

Sementara itu Riant Nugroho memberikan alternatif bahwa antara WID dan GAD adalah sebuah “pergantian“. Ini menjadi krusial karena banyak pendekar gender megecam bahwa pendekatan WID sudah usang, kadaluarsa, dan sebagainya sehingga harus dibuang dan diganti oleh pendekatan GAD. Kedua, bahwa pengarusutamaan gender memerlukan kondisi-kondisi dasar yang memungkinkannya bekerja secara efektif. Dalam ilmu ekonomi ini disebut sebagai cetiris paribus. Membangun kesetaraan gender memerlukan:

⁵⁴Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), xxi.

⁵⁵*Ibid.*. xxii

1. Kualitas pendidikan/pengetahuan minimum
2. Kualitas kesejahteraan minimum
3. Kualitas kehidupan bersama minimum.

Kedua, bahwa pengarusutamaan gender harus dilepaskan dari gerakan feminisme yang pada prinsipnya mengedepankan wacana bahwa sang pejuang haruslah perempuan. Keduanya antara laki-laki dan perempuan harus dilibatkan dalam pembangunan karena keduanya akan menikmati manfaat dari pembangunan itu sendiri. Keempat, sektor-sektor yang paling pokok dalam pengarusutamaan gender adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan administrasi publik.⁵⁶

Berbicara tentang gender juga tidak dapat dipisahkan dengan politik identitas. Adapun yang menjadi akar permasalahan dalam politik identitas ini adalah akan berhulu pada aspek yang berkaitan dengan ikatan primordial, terutama suku dan agama, serta berkaitan dengan aspek keruangan /space dimana para pelaku (biasanya elit dan institusi lokal) membutuhkan suatu ruang gerak (space) untuk mewujudkan eksistensi dan identitasnya sesuai dengan keinginan mereka.⁵⁷

Berbicara politik identitas tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan kehidupan social demokratisasi kapitalis Barat antara tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Dalam hal ini Yudi Latif mengatakan :

“Di seluruh dunia politik identitas yang mengukuhkan perbedaan identitas kolektif etnis, agama dan bahasa mengalami pasang surut. Persoalannya politik identitas adalah *politics of difference* yang didasarkan pada pencarian perbedaan”.⁵⁸

⁵⁶*Ibid.*, XXIV

⁵⁷Widya P. Setyanto dan Halomoan Pulungan (Ed.). *Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara*. (Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan, 2009), 20

⁵⁸ Yudi Latif. *Dalam Politik Identitas, Agama, Etnis* (Salatiga: Percik, 2009), 40

Demografi suatu Negara bangsa yang plural tentunya akan memperlihatkan aneka ragam etnis sebagai suatu variable yang sangat nyata, dimana etnis yang satu dengan yang lainnya memiliki variasi baik dalam jumlah, karakteristik, nilai-nilai hidup yang dianut dan system nilai kehidupan lainnya yang mereka miliki sebagai kebudayaannya.

Secara teoritis munculnya politik identitas disebabkan oleh banyak factor, antara lain terkait dengan adanya aspek kultural berupa disparitas ekonomi masa lalu dan juga masih berlanjutnya kesulitan saat ini yang telah memberikan alasan pembenaran upaya pemisahan sebuah kelompok primordial dalam bentuk otonomi atau bahkan memerdekakan diri. Dalam hal ini Yudi latif mengatakan bahwa berbicara politik identitas untuk masyarakat plural Indonesia kita akan dihadapkan secara terus menerus dengan ledakan pluralism dari luar dalam satu tarikan nafas.⁵⁹

Sesuai dengan perspektif konstruksi social menurut Shamsul,⁶⁰ “Pembentukan identitas adalah suatu fenomena social dan dapat dipahami dengan melihatnya dalam konteks dua realita social. Pertama, realita *authoritydefined* yaitu realita yang didefinisikan oleh pihak yang berada dalam struktur kekuasaan dominan. Kedua, realita *everydaydefined*, yaitu realita yang dialami sendiri oleh individu dalam kehidupan sehari-harinya.

Munculnya keinginan untuk mewujudkan identitas kelompok mungkin datang dari internal kelompok itu sendiri, dimotivasi oleh dorongan kekitaan, rasa gotong royong, keistimewaan diri atau komunalisme. Namun, yang sering terjadi menurut Shamsul merupakan hubungan timbal-balik pengaruh luar dan dalam yang terjadi serentak akibat faktor sejarah, politik, ekonomi, agama dan lain-lain.

⁵⁹*Ibid.*, 35

⁶⁰Syamsul A.B. *Debating About Identity in Malaysia: A Discourse Analysis* (Southeast Studies 34, 1996), 3

Sementara itu dari sosiologi politik sebagian orang menganggap politik sebagai pergolakan pertempuran kekuasaan memungkinkan kelompok-kelompok dan individu-individu yang memegangnya untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat untuk mengeksploitasinya. Kelompok kedua menganggap bahwa politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelompok kepentingan khusus. Bagi yang pertama, politik bertugas untuk mempertahankan hak-hak istimewa suatu minoritas terhadap mayoritas. Bagi yang kedua, dia adalah alat untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan kota adil sebagaimana dibicarakan Aristoteles.⁶¹ Penganutan terhadap suatu pandangan ditentukan oleh status sosial seseorang. Maka dalam sosiologi politik pada hakikatnya berkisar pada tema dua wajah kekuasaan, yaitu sebagai penindas maupun sebagai integrator.

Sebagai landasan hukum dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“ pasal 2 bb, 28c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h, dan 28 i
- UU no 39 tahun 1999 tentang HAM
- PP no 5 tahun 2010
- RPJMN 2010-2014
- UU no 10 tahun 2008 tentang PEMILU
- UU no 2 tahun 2008 yang telah direvisi menjadi UU no 2 tahun 2011 tentang Partai politik.
- UU no 8 Tahun 2012 Tentang PEMILU

⁶¹Duverger, *Sosiologi Politik*....

Era reformasi merupakan suatu era yang bergulir pada 1997-1998 yang berhasil “memaksa“ Presiden Soeharto lengser atau mundur dari kekuasaannya selama lebih dari 30 tahun. Yang menyebabkan politik Indonesia berubah drastis. Selama lebih dari tiga dekade rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto bangsa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang menganut sistem otoriter. Meskipun pemerintahan Soeharto sendiri menamakan sistem politik yang dipertahankannya selama tiga dekade sebagai “Demokrasi Pancasila“ dalam realitasnya yang berlangsung adalah sistem otoriter yang terselubung “demokrasi“⁶².

Sejak Pemilu 1999 yang kemudian dilanjutkan dengan empat tahap amandemen terhadap UUD 1945, Indonesia memasuki era baru yang secara publik sering disebut sebagai “era Reformasi“ yang ditandai dengan keterbukaan dan demokratisasi yang membentuk sistem politik baru yang secara struktural berbeda dengan sistem politik otoriter Orde Baru.

Pada Era Reformasi terdapat beberapa ciri-ciri yang membedakan dengan Orde Baru. Pertama, pembatasan kekuasaan dan masa jabatan Presiden selama maksimal dua periode masa jabatan atau dua kali lima tahun. Kedua, adanya jaminan konstitusi dan perundang-undangan bagi hak-hak politik, kebebasan sipil, hak-hak asasi, kebebasan sipil, hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara. Ketiga, jaminan bagi kemerdekaan dan kebebasan pers. Keempat, berlangsungnya pemilu yang bebas, fair, dan demokratis yang diselenggarakan oleh Komisi pemilu yang independen. Kelima, semua anggota parlemen baik nasional (DPR dan DPD) maupun daerah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, dipilih melalui pemilihan umum. Keenam, adanya jaminan kebebasan berserikat memungkinkan setiap warga negara membentuk partai politik untuk ikut serta dalam pemilu, sehingga terbentuk lebih dari 100 parpol menjelang

⁶²Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen era Reformasi*. (Jakarta: Yayasan Obor, 2014), 1

Pemilu 1999. Ketujuh, militer mundur dari politik, sehingga semua jabatan politik formal di legeslatif dan eksekutif kini hanya bisa diisi oleh politikus sipil⁶³.

G. Metodologi Penelitian

1. Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di provinsi Jambi yang terdiri dari sebelas kabupaten kota. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus yaitu suatu metode yang dapat mengungkap secara rinci fenomena atau situasi dari unit analisis yang berupa individu, kelompok individu atau entitas lain atas dasar informasi yang dikumpulkan secara sistematis.⁶⁴ Riset studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi satu kasus spesifik dapat berupa entitas yang konkret, misalnya individu, kelompok kecil, organisasi dan kemitraan.⁶⁵ Tujuan dari pelaksanaan studi kasus tersebut disusun untuk mengilustrasikan kasus yang unik, kasus yang memiliki kepentingan yang tidak biasa dalam dirinya dan perlu dideskripsikan. Masalah utama yang akan menjadi sasaran penelitian ini adalah partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Jambi studi kasus beberapa politisi dengan mengamati peran, peluang dan tantangan yang dihadapinya serta strategi yang dilakukan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

⁶³*Ibid.*, 5

⁶⁴A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Studi Kasus: Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: PT Kiblat Buku Utama, 2015), 167

⁶⁵Yin, R.K. *Case Study Research: Design and Method (edisi ke 4)*. (Thousand Oaks, CA:Sage, 2009), 127

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik, dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.⁶⁶ Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan perempuan yang aktif dalam bidang politik baik di legislatif maupun eksekutif, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah provinsi Jambi pengurus partai politik, KPU, Panwaslu. Adapun observasi yang dilakukan secara langsung adalah kegiatan yang dilakukan caleg perempuan seperti sosialisasi, kampanye dan Pemilu.

Wawancara yang dilakukan kepada caleg perempuan seperti Pit Arjuna dari PAN, Indrawati Sukadis dari Partai Demokrat, Daryati Uteng dari Partai Golkar, Reni Lestari dari PKS, dan Lili Priorita dari PDIP.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen atau dari bahan perpustakaan.⁶⁷ Data ini dapat juga berupa buku-buku dan laporan penelitian serta jurnal yang di dalamnya membahas tentang Jambi. Selain itu Data ini diperoleh untuk melihat data tentang demografi provinsi Jambi, jumlah penduduk, keadaan sosiologis masyarakat dan lain-lain.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci (responden) dan informan pendukung. Sumber data informan kunci diperoleh melalui:

- 1) Perempuan yang aktif dalam bidang politik di legislatif di antaranya anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 1999 ibu Hartiati Ambiar Usman dari

⁶⁶Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

⁶⁷*Ibid.*, 88

Golkar Tahun 2004-2009, Daryati Uteng dari Golkar, Tahun 2009-2014, Reni Lestari dari PKS, dan Indrawati Sukadis.

- 2) Perempuan yang ikut serta dalam pemilihan umum anggota legislatif.
- 3) Pemerintah provinsi Jambi, baik di bagian sekretaris daerah, KPU dan KPUD kabupaten dan kota.
- 4) Pengurus Partai politik

Sedangkan sumber data informan pendukung diperoleh melalui tokoh masyarakat. Seperti Ketua Lembaga Adat Jambi, Majelis Ulama Jambi, Aktivistis perempuan Jambi seperti Rizky Takrianti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya pada informen. Seseorang dapat melihat wawancara sebagai serangkaian langkah dalam suatu prosedur. Beberapa penulis seperti Kvale dan Brinkmann telah memaparkan tujuh tahapan wawancara mulai dari tematisasi penelitian, desain studi, wawancara, menulis atau merekam wawancara, kemudian analisis data, verifikasi validitas, reliabilitas dan generalisabilitas dari temuan dan terakhir pelaporan studi.⁶⁸ Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi peran dan tantangan perempuan dalam politik serta hambatan yang mereka hadapi di provinsi Jambi. Wawancara dilakukan kepada caleg yang terpilih dan tidak terpilih pada Pemilu Legislatif seperti Hartiati Ambiar dari Partai Golkar, Reni Lestari dari PKS,

⁶⁸John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, TT), 231.

Daryati Uteng dari partai Golkar, Lili Priorita dari PDIP, dan Indrawati Sukadis dari Partai Demokrat serta Pit Arjuna dai Partai Amanat Nasional.

b. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan sistem fenomena yang diselidiki untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang diteliti. Mengamati berarti memperhatikan fenomena di lapangan melalui kelima indra peneliti, seringkali dengan instrument atau perangkat, dan merekamnya untuk tujuan ilmiah.⁶⁹

Observasi yang penulis lakukan di sini adalah observasi partisipan langsung yaitu dimana yang menjalankan penelitian terjun langsung dan berkecimpung bersama objek penelitian. Adapun kegiatan yang langsung dilakukan adalah kampanye Pemilu Legeslatif, sosialisasi Caleg, menjadi mentor caleg perempuan sebelum pelaksanaan Pemilu. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang bentuk partisipasi perempuan dalam politik di Provinsi Jambi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data yang telah tersusun yang terdiri dari surat-surat, majalah, buku-buku notulen, rapat perkumpulan, dokumentasi resmi dari berbagai instansi pemerintah. Dokumentasi ini untuk memperoleh data tentang wilayah Provinsi Jambi, Hasil PEMILU legeslatif dari tahun 2004 sampai 2014.

4. Analisis Data

Analisa penelitian ini dengan menggunakan data yang bersifat kualitatif yang dianalisa dengan non statistik yang berupa uraian kalimat yang dapat dipakai dengan

⁶⁹*Ibid.*, 227.

menggunakan pendekatan gender dan sosiologi politik. Menurut Duverger, sosiologi politik adalah studi tentang fenomena pengelompokan manusia, bukan hanya negara (nation state) Masing-masing kelompok manusia mewujudkan dalam suatu struktur, yaitu suatu kerangka dimana aspek-aspek konflik dan integrasi dari kekuasaan saling memainkan peran.⁷⁰ Teori partisipasi juga digunakan sebagai bahan analisis guna melihat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik seperti faktor budaya, pendidikan, agama, status social dan lain sebagainya.

Teknik penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama penelitian dilaksanakan. Reduksi data merupakan wujud analisis yang menajamkan, mengarahkan data berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam politik di provinsi Jambi.

b. Display Data (Penyajian Data)

Pada tahapan ini disajikan data hasil temuan di lapangan dalam bentuk teks naratif, yaitu uraian verbal tentang peran, peluang, dan tantangan perempuan dalam politik di provinsi Jambi. Setelah data terfokus dan dispesifikasikan, penyajian data berupa laporan dibuat. Tetapi bila data yang disajikan perlu direduksi kembali, maka reduksi data dapat dilakukan kembali guna mendapatkan informasi yang lebih sesuai. Setelah itu data disederhanakan dan disusun secara sistematis tentang hal-hal yang dapat memberi gambaran tentang

⁷⁰Duverger, *Sosiologi Politik*, XIV

konsep, perencanaan, pengelolaan dan hasil yang telah dicapai.

c. Triangulasi data

Triangulasi data dilakukan secara sadar untuk mengumpulkan dan memeriksa kembali temuan-temuan, dengan menggunakan sumber-sumber ganda dan cara-cara perolehan data, proses pengujian dapat dibangun untuk proses perolehan data.

d. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan upaya mencari makna dari komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi dan hubungan sebab akibat. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan peninjauan terhadap penyajian data dan catatan di lapangan melalui diskusi dan arahan promotor.

H. Sistematika Pembahasan

Pada Bab I penelitian ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari partisipasi politik perempuan di Indonesia yang dimulai semenjak masa Orde Baru sampai masa Reformasi yang ditandai dengan beberapa perubahan perundang-undangan pemilu yang berkaitan dengan kuota perempuan di legislatif.

Bab III berusaha untuk mengungkapkan tentang dinamika pergerakan perempuan Jambi. Dengan mengemukakan sejarah kepemimpinan perempuan Jambi, Perempuan dalam Budaya Jambi. Serta perempuan dalam organisasi sosial politik, social keagamaan, perempuan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat, perempuan dalam Partai

Politik di Jambi, Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pemberdayaan Perempuan.

Pada Bab IV Mengemukakan tentang Partisipasi Politik Perempuan di parlemen dengan menjelaskan kondisi objektif perempuan Jambi di parlemen. Pengalaman beberapa politisi perempuan di legislatif. Selanjutnya mengemukakan akses dan peluang serta hambatan dalam partisipasi serta strategi yang dilakukan.

Bab V Penutup. Kesimpulan dan Saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara makro partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia semenjak reformasi sampai Pemilu 2014 tergolong rendah baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas masih sangat jauh dari angka 30%. Secara kualitas persoalan yang berkaitan dengan gender masih banyak yang belum terselesaikan. Masih tingginya tingkat kemiskinan, HDI yang masih rendah, tingkat kematian ibu dan bayi yang masih tinggi. Kualitas penduduk Indonesia secara makro juga tercermin melalui kualitas perempuan. Perempuan tertinggal dalam sektor pembangunan di bidang-bidang strategis. Persoalan yang sama juga terjadi dalam tingkat mikro sebagaimana provinsi Jambi. Yakni partisipasi perempuan dalam segala bidang rendah, terdapat praktek diskriminatif, kesehatan dan lingkungan kurang, nilai sosial budaya yang bias gender, tingginya tingkat kekerasan dan bias gender. Dan lain sebagainya. Secara kuantitatif keterwakilan di parlemen juga masih jauh dari angka 30%. Meskipun pada Pemilu 2014 terjadi peningkatan.

Secara nasional masalah utama terkait keterwakilan perempuan adalah kelembagaan. Jika masalah sosial dilihat dari pendapat masyarakat tentang keterwakilan perempuan seperti hasil survey UNDP, maka masalah sosial bukan faktor penghambat utama. Akan tetapi masalah sosial dan kelembagaan menjadi masalah utama di Provinsi Jambi. Masalah sosial budaya yang paling menghambat adalah sosial budaya masyarakat dan hambatan domestik. Hambatan pemberlakuan kuota 30% terletak pada banyak aspek, seperti budaya masyarakat Jambi yang masih menganggap perempuan sebagai makhluk kelas dua. Hambatan normative terutama berkaitan dengan penafsiran

ayat al Quran dan Hadits nabi serta ketidaksesuaian dengan norma domestic yang berlaku di Provinsi Jambi serta ketidakjelasan norma itu sendiri sehingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda-beda dalam masyarakat. Kurangnya pendidikan perempuan di provinsi Jambi juga menjadi hambatan tersendiri terutama pendidikan politik. Maka dalam hal ini partai politik memegang peranan penting dalam proses pemberdayaan mereka. Partai politik memiliki perancang besar dalam hal pencalonan perempuan terkait kebijakan internal parpol dalam proses seleksi pemilihan bakal calon. Hambatan lainnya adalah system Pemilu Indonesia selama ini.

Secara nasional terdapat praktik politik keluarga (politik dinasti) yang memperlihatkan 36 % mempunyai hubungan keluarga dengan pimpinan atau elit partai. Hal ini juga terjadi di provinsi Jambi yang memperlihatkan anggota legislatif perempuan yang mempunyai hubungan keluarga dengan kepala daerah atau mantan kepala daerah. Hal ini mempunyai dampak negatif terutama menghalangi terlaksananya Pemilu yang adil. Perpolitikan dinasti merusak kepercayaan akan keagenan perempuan terpilih menjadi legislator dan merupakan bentuk penyalahgunaan kebijakan afirmasi bagi perempuan.

Dinamika pergerakan organisasi social politik perempuan Jambi sangat dinamis terutama pada organisasi-organisasi perempuan seperti Nasyiatul Aisyiah, Fatayat NU dan BKMT, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Akan tetapi secara substansi belum ada aktivis dari organisasi perempuan yang menjadi anggota legislatif di provinsi Jambi. Seringkali organisasi perempuan seperti BKMT dimanfaatkan oleh caleg perempuan. Demikian juga dengan KPI wilayah Jambi Lembaga Swadaya Masyarakat yang tumbuh pada masa reformasi belum maksimal dalam memperjuangkan hak politik perempuan. Bahkan sering kali suara mereka tidak didengar oleh caleg perempuan itu sendiri. Keaktifan perempuan Jambi nampak terutama dalam institusi-institusi publik yang

keanggotaannya bersifat homogeny yaitu organisasi yang diperuntukkan bagi perempuan, dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat khas perempuan. Hal ini mengakibatkan semakin mendomestikkan perempuan dan menjauhkan perempuan dari kebutuhan-kebutuhan strategis, termasuk akses dan control mereka terhadap proses kebijakan public. Kondisi ini tidak bias dilepaskan dari sejarah masa lalu Orde Baru yang memosisikan perempuan sebagai obyek yang kemudian mempengaruhi secara cultural dan struktural terhadap posisi perempuan. Maka dengan demikian modal sosial tidak dianggap penting oleh perempuan dan partai politik. Partai politik lebih mengutamakan modal ekonomi. Berdasarkan pengalaman beberapa politisi dari tahun 1999 sampai 2014 patron struktural lebih kuat dari solidaritas identitas.

Strategi jangka pendek tidak efektif dalam membangun kesadaran masyarakat Jambi yang berimplikasi pada strategi jangka panjang, Meskipun pembangunan gender di provinsi Jambi meningkat. Tidak adanya sinkronisasi strategi jangka pendek dan jangka panjang diakibatkan oleh adanya proses yang terpotong dalam membangun kesadaran menyebabkan strategi jangka panjang tidak efektif dengan sendirinya. Sehingga tidak mampu mencapai representasi perempuan bila kesadaran mikro Jambi dan individu tidak terbangun. Yang mengakibatkan struktur patriarkhi menjadi bertahan dandidak terbangun solidaritas identitas tentang kejambian. Pada akhirnya sejarah Jambi yang panjang pernah dipimpin oleh seorang Putri yang gagah berani masih jauh dari harapan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang perlu diperhatikan berdasarkan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara nasional pemerintah harus meningkatkan pendidikan politik perempuan karena sangat mendesak untuk dilakukan guna mendorong partisipasi perempuan

dalam politik di provinsi Jambi khususnya dan Indonesia umumnya.

2. Kepada Partai Politik untuk dapat melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai karena yang baru hadir departemen perempuan sementara itu PUG dan representasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
3. Kepada tokoh adat agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap nilai-nilai adat yang selama ini terlanjur diartikan secara sepihak oleh masyarakat seperti seloko „Bini sekato Laki“ atau anggapan laki-laki “Langau Hijau“ bisa melangkah kemanapun ia pergi.
4. Membangun kerjasama secara integral dengan berbagai pihak termasuk LSM, agamawan dan media untuk secara bertahap melakukan pendidikan kritis bagi masyarakat terutama perempuan tentang hak-hak politik, sipil, ekonomi serta hak sosial budaya sebagai bagian dari hak azazi manusia dan hak sebagai warga negara.
5. Mengkritisi kebijakan-kebijakan negara yang bias gender.
6. Perlu adanya advokasi terhadap caleg perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Chaedar Alwasilah. *Pokoknya Studi Kasus: Pendekatan kualitatif*, (Bandung:PT Kiblat Buku Utama, 2015).
- Ali Engineer, Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terj Farid W dan Cici Farkha, Yogyakarta: LSPPA, 1994
- Amin, Qassim. *Tahrir al-Mar'ah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1990
- Andaya, Barbara Watson & Leonard Y Andaya. *A History of Malaysia*. London: Mcmillan, 1982.
- Arivia, Gadis. "Sekapur Sirih" dalam *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas, 2005
- Armando, Nina.M. (et al). *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2005.
- Blackburn, Susan. " The 1999 election in Indonesia; Where were the women?", kertas kerja dalam lokakarya The Indonesian Election : An Analysis, Monash University, 25 Juni 1999.
- Brooks, Ann. *Postfeminisme & Cultural Studies*. Terj. Postfeminisme: Feminism, *Cultural Theory and Cultural Forms*. Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Caul, Miki. *Woman Representation in Parliament: The Role of Political Parties: Party Politics Vit5 No1*. London: Sage Publication, 1999
- Dahlerup, Drude and Lenita Freidenvall. *Electoral Quota System and Their Implementation in Europe*, Wip, Women in Politics Research Centre, Department of

Political Science Stockholm University with International IDEA, 2008

- Dhewy, Anita. "Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014," *Jurnal Perempuan: Pemilu, Agama & Status Perempuan*. Vol 19 No 3, Agustus 2014. HALAMAN 103??
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Haris, Syamsudin. *Partai, Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2014.
- Harsono, Rebeka. *Gerakan Perempuan : Antara kepentingan Perempuan dan Politik Gender*. Universitas Gajah Mada: Pustaka Pelajar, 2006
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. *Partisipasi politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Kozok, Uli. *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu Yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kusujarti, Siti. "Relevansi ilmu Sosial dalam Perumusan Kebijakan tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan", makalah disampaikan pada Lustrum VIII Fisipol: UGM, 16 September 1995
- Lembaga studi Pengembangan Sumber Daya Manusia DPRD Provinsi Jambi*, 2000. *Profil Legislatif Propinsi Jambi Tahun 2000*.
- Locher-Scholten, Elsbeth. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial. Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: Banana KITLV, 2008

- Magil, Frank N. (ed.) *International Encyclopedia of Government and politics*. Singapura: Toppan Company PTE LTD, 1996.
- Mansour, Fakh. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSIS Pres, 2008.
- May, Darlene. *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995
- Mernisi, Fatima. *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan* .Bandung: Mizan,1994
- Ms.Terius, Daftar “Dinasti keluarga” dalam Partai Peserta Pemilu. Ciri. Cara. Com.Mukti Nasruddin. Evaluasi Raja-raja KerajaanMelayu Jambi II.
- Mulia, Siti Musdah dan Marzain Anwar. *Kondisi Perempuan di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Parani, Julianti L. “Jambi Sebagai Khazanah Multikultural: Suatu Perspektif Kesenian.Jurnal *Seloko*.Vol 1 no 2 2012, Hlm 192
- S Bessel, “Indonesia”, in Y.G. M. Tremblay (Ed), *Sharing Power: Women, Parliament, Democracy*. Burlinghton, USA: Ashgate, 2005.
- Setyanto, Widya P. dan Halomoan Pulungan (Ed.) *Politik Identitas:“Agama, Etnisitas dan Ruang/ Space dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara*. Salatiga: Persemaian Cinta Kemanusiaan, 2009.
- Shihab, Quraish. “Konsep Wanita Menurut Alquran dan Dadits dan Sumber-Sumber Ajaran Islam” dalam Lies Marcoes dan J.H. Meulleman (ed.) *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.

Singariabun. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Bumi Aksara., 1987

Smiley, Marion. "Gender, Democratic Citizenship v. Patriarchy: A Feminist Perspective on Rawls" *Fordham Law Review* 2004 Vol. 72, Issue 5, 1599-1627. Diakses dari <http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol72/iss5/11>. Diakses pada 1 Januari 2015

Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokrasi*. Indonesia: Pustaka Obor, 2015

Suryadinata, Leo, Evi Nurvidya Arifin dan Aris Ananta. *Indonesian's Population: Ethnicity and religion in a Changing Political Landscape*. Singapura: ISEAS, 2003.

Suryochondro, Sukanti. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.

Syamsul, A.B. "Debating About Identity in Malaysia: A Discourse Analysis", *Southeast Studies* 34, 1996, halaman 3 sampai 4...

Takakusu, Junjiro "A Record of The Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago, by I-Tsing, Oxford: Clarendon Press, 1896

Tinker, Irene. *Persistent Inequalities, Women and World Development*. Oxford University Press, 1990

Utomo, Bambang Budi. *Kebudayaan Zaman Klasik Indonesia di Batang Hari*. Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi 2011

- Wahyuni, Sri & Hedwigis Esti R. *Pandangan Publik Tentang Keputusan Perempuan dalam Kancah Politik di Indonesia Studi Kasus Dosen dan Mahasiswa ABFII Perbanas. Dalam Gender And Politics*. Yogyakarta: Kerjasama PSW Gadjah Mada dengan Sekolah Pascasarjana UGM dan Penerbit Tiara Wacana, 1999.
- Wardani, Sri Budi Eko. *Aspirasi Perempuan anggota Parlemen Terhadap Pemberdayaan politik Perempuan*. Jakarta: IDEA Internasional dan Yayasan Jurnal Perempuan, 1999
- Widyani, Ani. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas, 2005
- Yenti, Zarfina. *Perempuan dalam Partai Politik, Analisis terhadap Kegagalan Perempuan dalam Memenuhi Kuota 30% di DPRD Provinsi Jambi*. Jambi: Puslit IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2004.
- Yuliatin. *Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Pembagian Harta Waris di Seberang Kota Jambi*. Yogyakarta, 2014.





Wawancara dengan CW Watson dan istri. Watson meneliti tentang system adat di Kerinci



Peneliti terlibat langsung dalam proses rekrutmen anggota KPU di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi



Wawancara mendalam dengan ibu Indrawati Sukadis Anggota DPR RI mewakili Jambi dan Istri Gubernur Jambi Hasan Basri Agus



Observasi langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh ibu Daryati Uteng anggota DPD mewakili Jambi bersama aktivis perempuan Jambi



Terlibat langsung dalam kegiatan ibu Daryati Uteng anggota DPRD prov Jambi sekarang anggota DPD



Wawancara dengan ibu Valina Singka komisioner KPU RI pertama



Wawancara dengan istri Gubernur Jambi Zumi Zola ibu Sherian Taria



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zarfinayenti, M.Ag
Tempat/Tgl Lahir : Maliki Air Rawang, 02-05-1973
Pekerjaan : Dosen Fakultas Adab dan Humaniora
IAIN STS Jambi
NIP : 19730502 199803 2001
NIDN : 2002057302
Pangkat : Lektor kepala /pembina (IV/a)
Alamat Kantor : IAIN STS Jambi Jln. Jambi Muara
Bulian KM 16 Simpang Sungai Duren
Kab. Muara Jambi.
Telp/Fax : (0741) 584118
Email : zarfinayenti1@gmail.com
Nomor Kontrak : 081274038100
No WA : 081274038100
Email kantor : uinjambi@gmail.com
Alamat Rumah : Jl. Komplek Puri Masuwai IIA Blok I
Mendalo Jambi Luar Kota. Jambi.
Pendidikan : - S1 Sastra Arab F. Adab IAIN Imam
Bonjol Padang, Tahun 1995
- S2 UIN Jakarta, Jurusan pengkajian
Islam Tahun 1999

Pengalaman pekerjaan:

1. Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Adab dan humaniora 2002-2008
2. Wakil Dekan bidang kerjasama dan kemahasiswaan tahun 2009-2013
3. Wakil Dekan bidang kerjasama dan kemahasiswaan tahun 2013-2015
4. Tim Seleksi Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013

Karya Tulis Dan Penelitian:

1. Hubungan Agama dan Gender (Makalah Dipresentasikan di Pola Kantor Gubernur Propinsi Jambi, Acara Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Jambi Tahun 2002)

2. Hak-hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam, (Jurnal *Harakatun Nisa'*, Vol. 2 no 2. Desember 2002)
3. Perempuan dalam Partai Politik (Analisis terhadap Kegagalan Perempuan dalam Memenuhi Quota 30% di DPRD Propinsi Jambi, Penelitian di Pusat Penelitian IAIN STS Jambi 2004)
4. Penelitian Naskah Kuno Propinsi Jambi (Penelitian BALITBANG Depag RI 2006)
5. Penelitian al-Qur'an Tulisan Tangan (Penelitian BALITBANG Depag RI 2004)
6. Hubungan Agama dan Negara (Studi Perbandingan Pemikiran Politik al-Ghazali dan Ibn Taimiyah serta relevansinya pada masa kini). Tesis 1999
7. Revivalisme Ismail Raji al-Faruqi. Penelitian (Pusat Penelitian IAIN STS Jambi 2002)
8. Kontribusi Munawir Syazali terhadap Pemikiran Politik Islam Indonesia (Jurnal *Nazharat*, vol III, NO, 1 2004)
9. Konsepsi Pemikiran Politik al-Ghazali, (Jurnal *Nazharat*, Vol, II 2003)
10. *Al-Hayatul Ijtima'iyah waasaruha fi Sy'r al-'Araby fi 'Ashri 'Abbas*, Skripsi, 1995
11. Efektifitas BKMT Kota Jambi dalam Meningkatkan Pengetahuan Agama Anggotanya Pustlitian 2009.
12. Perdagangan Orang di Propinsi Jambi. tahun 2009. Sumber Dana Kementerian Agama RI
13. Pola Pengembangan Madrasah Di kabupaten 50 Kota. Batu Sangkar. Tahun 2010. Sumber Dana. BALITBANG Provinsi Jambi
14. Pemberdayaan Perempuan Penambang Perahu di Objek Wisata Danau Sipin Kota Jambi Kementrian Agama RI 2011.
15. Kemampuan Alumni Madrasah di Perguruan Tinggi Umum Jambi .Tahun 2011 Sumber Dana Balai Penelitian Kementerian Agama. Jakarta
16. Upaya Pemerintah Sungai Penuh Dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Anggota Jam "Iyatul Islamiyah" DIPA IAIN STS Jamb Tahun 2012
17. Kesehatan Reproduksi Perempuan Rimba. Sumber Dana DIKTIS tahun 2013

18. Perempuan Penambang Perahu di Objek Wisata Danau Sipin Kota Jambi: Studi Tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Memanfaatkan dan Melestarikan Lingkungan Jurnal Media Akademika Volume 28 no 1 Januari 2013.
19. Pengaruh Zypper System terhadap keterwakilan Perempuan di DPRD Propinsi Jambi. Sumber Dana IAIN STS Jambi.Tahun 2014
20. Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Orang Rimba Bukit 12 Jambi. Sumber Dana DIPA IAIN STS Jambi Tahun 2015.
21. Kearifan Lokal Perempuan Rimba dalam Memanfaatkan Lingkungan. AICIS 2016
22. Diskursus LGBT di Kota Jambi: Studi terhadap Penerimaan dan Penolakan.DIPA IAIN STS Jambi 2016

Pelatihan yang pernah diikuti:

1. Workshop Gender dalam Manajemen diadakan Kementerian Agama Tahun 2000.
2. Pelatihan Penelitian Filologi Tahun 2012.
3. Pelatihan Penelitian Dosen IAIN Sulthan Taha Saifuddin Jambi Tahun 2008
4. Pelatihan Orientasi Hak Azazi Manusia (HAM) Kementrian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian Agama RI Tahun 2010.
5. Workshop Pengantar Kajian dan Metodologi Penelitian Gender Tahun 2012.
6. WorkShop Peningkatan Mutu Penelitian Dosen IAIN STS Jambi Tahun 2013.
7. International Workshop Developing Islamic Higher Education Toward Class University: Teaching Quality Improvement for Lecturers Tahun 2014
8. Workshop Mutu Penelitian Dosen IAIN STS Jambi Tahun 2014
9. Short Course Metodologi Penelitian Sosial Keagamaan Tingkat Nasional oleh Kementerian Agama RI Tahun 2014.
10. Workshop Keluarga Sakinah kerjasama dengan FSSS UM Malaysia Tahun 2015

11. Workshop Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2015.
12. Workshop Pengembangan Pendidikan Keagamaan di Daerah Tertinggal Komunitas Adat di Jambi. Kementerian Agama RI Tahun 2016
13. Pelatihan Pendamping Kukerta Tematik Berbasis Mesjid dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kelompok Kerja LP2M IAIN STS Jambi Tahun 2016.
14. Pelatihan Penulisan Naskah Jurnal Nasional IAIN STS Jambi Tahun 2016.

